

e-news letter

JULI 2020

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Selamat  
Jalan  
Cura*

**KH. HILMI AMINUDDIN**

27 Desember 1947 - 30 Juni 2020



# Yang Mengawali Telah Pergi

K

Yang berjumpa dengan beliau selepasnya akan penuh dengan energi, karena setiap tutur dan sikap jadi bekal dakwah yang lebih dari cukup untuk mengarungi setiap tantangan. Awalnya awam jadi paham hingga akhirnya tsiqah pada seluruh ketentuan baik. Beliau selalu yakinkan bahwa jalan ini ditempuh bukan mencari titian dunia namun

Raihan akhirat, yang lebih baik dan lebih kekal dari dunia serta seisinya. Maka setiap jabatan tidak menjadi beban, namun amanah yang harus ditunaikan. Maka setiap langkah dakwah tidak menjadi sesal, karena sabar dan tawakal menjadi bekal meraih kebaikan dihadapan Allah. Terlebih, bukan seberapa besar orang yang datang dan pergi memberikan dukungan.

Dalam buku 'Bekal Untuk Kader Dakwah' dalam bab

Siklus Manajemen Dakwah beliau yakinkan setiap kita harus berorientasi kepada Allah dan bersabar. Hendaknya kita terus melakukan taqarrub dan ta'abbud kepada Allah dalam segala hal Langkah-langkah perjuangan kita. Sehingga Insya Allah output-nya berupa hasanat, "Innal hasanati yudzhibnassayiat". Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Jika kita terus mendekat kepada Allah dan berta'abbud

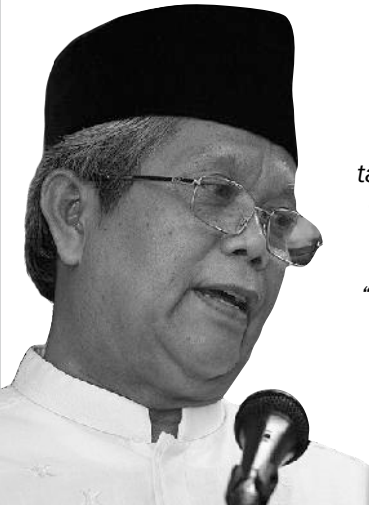
kepadaNya, maka insya Allah akan menjadi manusia-manusia produktif yang melahirkan banyak kebajikan sehingga akan menetralkan kekurangan dan kelemahan kita sebagai manusia.

Bersabarlah, karena untuk bisa istiqomah diperlukan kesabaran. Agar tidak melampaui batas kita juga harus sabar. Demikian pula agar bisa 'tidal, washatiyah dan melangkah secara bertahap, tadarruj kita harus sabar. Wasbir, betapun sulitnya menanggung beban kesabaran, yakinilah bahwa Allah tidak pernah melalaikan, melupakan ataupun menyianiyakan orang-orang yang berjuang secara ihsan dengan penuh tanggung jawab, profesional dan selalu yakin akan pertolongan Allah SWT.

Kini beliau telah kembali keharibaan Allah SWT, sontak jutaan jiwa kader seperti terputus dari cinta yang paripurna. Cinta yang dibangun dengan tulus ikhlas, disemai dengan kesungguhan memberi tanpa pamrih. KH. Hilmi Aminuddin telah menjadi Guru bagi banyak ustadz dan ustadzah, Bapak bagi para insan bertaqwa dan kawan bagi para syuhada dakwah. Beliau yang diawal meletakkan batu

bata kini telah pulang menemui sang Khalik dengan tenang. Ketika setiap raga ingin memeluknya untuk terakhir kali, beliau pergi dalam kesunyian sebagaimana ketika awal memulai semua kebaikan ini. Air mata tumpah ruah di pelataran dakwah, dunia terasa menghentak keras karena yang terbaik telah pergi. Yang pergi tidak akan Kembali, dia kekal dan lekang dihadapan Tuhan Allah SWT. Kami bersaksi bahwa beliau orang yang sangat baik.

Setiap kita harus berorientasi kepada Allah dan bersabar. Hendaknya kita terus melakukan *taqarrub* dan *ta'abbud* kepada Allah dalam segala hal langkah-langkah perjuangan kita. Sehingga Insya Allah *output*-nya berupa *hasanat*, "*Innal hasanati yudzhibnassayiat*". Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan.





الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إنا لله وإنا إليه راجعون



Keluarga besar Fraksi PKS DPR RI Turut berduka  
atas berpulangnya ke rahmatullah guru kami,

## KH. HILMI AMINUDDIN

Wafat pada Selasa 30 Juni 2020 pukul 14.24 WIB  
di RS. Santosa Central, Kota Bandung.

Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya  
serta menempatkannya di tempat terbaik  
di Jannah-Nya. Amin.



**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



*Selamat  
Jalan  
Guru*



*Jazuli Juwaini:*

## ***PKS Kehilangan Guru dan Pembimbing Dakwah***

**K**etua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengabarkan kepergian KH. Hilmi Aminuddin yang meninggal pada hari ini Selasa 30 Juni 2020 di Rumah Sakit Santosa Central Kota Bandung Jawa Barat.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun telah berpulang ke Rahmatullah guru dan pembimbing kami KH. Hilmi Aminuddin. Kami mohon doa, semoga amal ibadah Beliau diterima di sisi Allah swt dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Atas nama keluarga besar Fraksi PKS mengucapkan duka cita yang mendalam untuk keluarga beliau," kata Jazuli.

Ustadz Hilmi Aminuddin, lanjut Jazuli, adalah muassiss atau perintis dakwah PKS bahkan jauh sebelum menjadi partai politik. Beliau menjadi Ketua Majelis Syuro PKS sebelum Habib Salim Segaf Al-jufri saat ini. Dengan latar belakang dan posisi tersebut beliau sangat

dihormati dan dicintai oleh kader-kader PKS. Jasanya dalam membesarkan PKS tidak akan dilupakan oleh para kader.

"Beliau adalah orang tua, guru, sekaligus pembimbing bagi kader-kader PKS di seluruh Indonesia sehingga kami merasa sangat kehilangan atas kepergian beliau. Fa insya Allah beliau husnul khotimah," doa Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan bahwa banyak sekali warisan ilmu dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh beliau. Beliau memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang Islam dan dakwah yang rahmatan lil alamin di Indonesia.

"Selamat jalan Guru kami, Inshaallah segala ilmu, kesabaran, dan pengorbananmu menjadi amal jariyah dan mengantarkan kemuliaan di sisi Allah swt. Aamiin ya Robbal aalamiin," pungkaskan Jazuli



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
*Ketua Fraksi PKS DPR RI*



*Beliau adalah orang tua,  
guru, sekaligus pembimbing  
bagi kader-kader PKS di  
seluruh Indonesia sehingga  
kami merasa sangat  
kehilangan atas kepergian  
beliau. insya Allah beliau  
husnul khotimah*





*Selamat  
Jalan  
Cuma*



## *In Memoriam* **Ustadzuna KH. Hilmi Aminuddin**

**B**agi saya, ia bukan sekedar paman bagi keponakannya, bukan sekedar murobbi bagi anak-anak muridnya. beliau adalah guru kehidupan.

Ia mampu menerjemahkan ayat demi ayat Al-Qur'an dalam kehidupan baik skala kecil, maupun besar...

Pemikirannya melompat jauh, Wawasan syumuliyatul Islam terjewantah dalam narasi pemikiran dan langkah-langkah perjuangannya.

Darinya saya belajar tentang selera bershadaqah yang tidak hitung-hitung. Merawat, menjaga dan melindungi dakwah adalah prioritas utama, meski kerap ujian pahit dialami.

Namun begitulah sunnatuddakwah Semakin tinggi keimanan, semakin berat ujiannya.

Selamat Jalan Mang... Bukan cuma kami yang kehilangan... Dakwah ini.. Indonesia.. Bahkan Dunia telah

kehilanganmu... Mu'asis Dakawah, Orang Tua, Paman, sekaligus Murobbi

Semoga Allah memberikan tempat mulia yang terbaik untukmu...

Semoga segala nilai dan tarbiyah yang kau tanamkan pada kami menjadi shadaqah jariah sebagai bekal di kehidupanmu yang abadi...

Yaa Rabb berikanlah kemuliaan dan syurgaMu baginya.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَلِإِخْوَةِ عَافِيهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ  
رُتْبَهُ وَوَسِّعْ مَذْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِّ وَالْبَرْدِ  
وَتَقَبَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَقَبُّبُ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ  
الدَّنَسِ وَأَيِّدْهُ دَائِرًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا  
مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ  
وَأَعِزَّهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ  
أَمَّا هَـٰذَا فَاغْنِنِي عَنْهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Asyhadu annahu min ahliil khayr.

Bandung, 30 Juni 2020



**NURHASAN ZAIDI**

*Keponakan dari Ustadz  
Hilmi Aminuddin*

*Anggota Komisi VIII  
Fraksi PKS DPR RI*



*Darinya saya belajar tentang  
selera bershadaqah yang  
tidak hitung-hitung.  
Merawat, menjaga dan  
melindungi dakwah adalah  
prioritas utama, meski kerap  
ujian pahit dialami*



*Selamat  
Jalan  
Guru*



**Bukhori Yusuf**

## ***Kami Kehilangan Sosok Teladan***

Jakarta (01/07) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan rasa belasungkawa-nya yang mendalam atas wa-fatnya Ustaz Hilmi Aminud din, pendiri PKS sekaligus mantan Ketua Majelis Syuro PKS.

Bukhori menyatakan rasa kehilanganannya sesaat setelah mengetahui kabar duka tersebut.

“Sejujurnya, kami sangat terkejut mengetahui kabar tersebut. Kami merasa sangat kehilangan mengingat beliau adalah guru, orangtua, sekaligus teladan kami” ungkap Bukhori.

Bukhori yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Perencanaan DPP PKS menyatakan, Ustaz Hilmi Aminuddin adalah mubaligh yang mendedikasikan seluruh hidupnya bagi kepentingan dakwah.

Selain itu, lanjutnya, pada awal munculnya gerakan dakwah Tarbiyah di era 1980, beliau dikenal sebagai mubaligh yang gigih dan berani untuk berdakwah dari masjid ke masjid atau dari satu kelompok ke kelompok lain untuk mengenalkan aja-

ran Islam yang menyeluruh (syumul) kepada masyarakat.

“Beliau telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk kepentingan umat. Semasa hidupnya, almarhum adalah sosok yang gigih dan berani untuk mengajar ngaji bagi masyarakat dari satu tempat ke tempat lain kendati harus sembunyi-sembunyi. Sebab, di masa itu sulit sekali untuk berdakwah secara terbuka sebagaimana yang bisa kita lakukan sekarang” katanya.

Secara historis, salah satu keberhasilan Ustaz Hilmi Aminuddin dalam berdakwah adalah kesuksesannya membentuk Partai Keadilan pada tahun 1998.

Dengan kapasitas yang dimiliki, beliau berhasil mengkonsolidasikan potensi umat Islam, khususnya generasi muda kala itu meskipun di bawah bayang-bayang cengkraman pemerintahan Orde Baru yang represif.

“Sehingga pada saat meletusnya reformasi, dengan kepiawaiannya, beliau mampu menghadirkan sebuah partai Islam bernama Partai Keadilan yang kemudian dikenal dengan nama PKS,” sambungnya.



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI



*“Atas sumbangsih beliau, banyak orang yang merasakan manfaat dari dakwahnya. Semoga amal baik beliau semasa hidup menjadi wasilah yang menempatkannya di sisi mulia, yakni sisi Allah S.W.T”*



*Selamat  
Jalan  
Guru*



*Kurniasih Mufidayati:*

## ***Jazakallah Khair Ustadz Hilmi Aminuddin***

Rumah dakwah yang menampung umat itu kini telah membesar. Betapa banyak orang yang berteduh dan mendapat manfaat dari rumah ini. Dan kita semua berdoa, seluruh manfaat yang diberikan rumah ini bagi penghuninya dan lingkungan rumah itu, pahalanya deras mengalir untuk Ustadz Hilmi.

Rumah ini sudah berdiri kukuh. Hari ini ditinggal pergi peletak fondasi pertamanya bangunannya. Inilah warisan besar dari Ustadz Hilmi. Tugas kita semua yang mendapatkan manfaat dari rumah ini untuk terus menjaga kukuhnya bangunan ini. Dan memperindah rumah ini dengan amalan dan perjuangan dakwah yang semakin kuat.

Saya mengenang Ustadz Hilmi sebagai sosok yang amat sederhana. Beliau adalah pendiri dan peletak dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tapi hingga akhir hayatnya, beliau memposisikan diri sebagai guru dan orang tua. Setiap kali saya memanggil beliau ustadz, maka beliau menyebutkan 'bapak'.... Selalu ingin disebut 'bapak', ketimbang disebut 'ustadz'. Tak pernah

ingin menunjukkan kehebatan luar biasa yang Allah anugerahkan pada beliau. Selalu menugaskan yang lain untuk tampil dan maju.

Satu per satu masyarakat menaruh kepercayaan. Banyak murid-muridnya telah dihantarkan sebagai pejabat publik. Sang Ustadz, tetap setia menjadi guru dan orang tua. Tak berubah sejak awal membangun gerakan dakwah ini. Sampai kemarin, Allah SWT memanggil beliau. Tak ada yang berubah dari kesederhanaannya.

Jazzakallah Ustadz. Engkau telah merintis dan membekas dakwah ini, dengan akhir yang istiqomah dan indah. Sekarang kami yang khawatir, akankah kelak hidup kami akan berakhir seperti guru-guru kami yang ikhlas?

Selamat Jalan Ustadz, Seluruh Perjuangan insyaAllah akan mengalir menjadi jariah. Ilmu, nasehat, hikmah dan kenangan yang luar biasa itu.... tak akan pernah hilang dari jiwa kami.

Beristirahatlah di SurgaNya nan Indah, sebaik baik tempat di sisi Allah SWT.



***Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.***  
*Anggota Fraksi PKS DPR RI*



*Rumah dakwah yang menampung umat itu kini telah membesar. Betapa banyak orang yang berteduh dan mendapat manfaat dari rumah ini. Dan kita semua berdoa, seluruh manfaat yang diberikan rumah ini bagi penghuninya dan lingkungan rumah itu, pahalanya deras mengalir untuk Ustadz Hilmi.*



*Selamat  
Jalan  
Guru*



Ahmad Syaikhul

## Mengenang Ustadz Hilmi Aminuddin

Almarhum adalah seorang guru. Juga orangtua bagi kami yang ada di PKS. Terobosan politiknya dengan mendirikan Partai Keadilan (PK) dan kini PKS mengajarkan kita tentang banyak hal.

Bahwa politik itu bukan sekadar kekuasaan. Siapa dapat apa dan bagaimana caranya. Bahwa politik itu adalah berkhidmat. Melayani tanpa kenal lelah. Bahwa politik dan Islam itu bukan air dan minyak. Keduanya bisa disatukan. Sebab keduanya saling membutuhkan.

Kini, terobosan politik almarhum sudah tercatat dalam sejarah. PKS jadi partai Islam yang sangat diperhitungkan dalam panggung politik nasional. Jadi harapan umat, ulama dan rakyat. Mampu melahirkan kader-kader yang berkontribusi bagi bangsa dan negara dalam bingkai Pancasila dan NKRI.

Belakangan ini, saya sering membaca tulisan-tulisan beliau. Isinya sarat dengan pesan dan motivasi. Seringkali saat saya akan ceramah atau memberikan pembekalan, saya sampaikan kembali pesan-pesan beliau yang

saya baca. Termasuk ketika saya diminta memberikan sambutan pada acara Halal bi Halal DPW Jawa Barat.

Saya mengutip kata Ahli Hikmah yang beliau tuliskan pada kata sambutan Buku Rencana Strategis PKS:

Alaikum bi badzril hub wa ri'ayatihi bil hub wa ya'tihi atstsamrota minarrab.

"Kewajiban kalian adalah menebarkam benih dan merawatnya dengan cinta. Dan Allah-lah yang akan mendatangkan buahnya."

Demikian juga ketika saya diminta mengisi motivasi pada kader-kader PKS di Banten. Saya juga menyampaikan pesan-pesan yang sering beliau ingatkan dalam mengokohkan dakwah dan mensolidkan kader dakwah.

Takdir nampaknya berkata lain. Allah lebih mencintai beliau, dengan memanggilnya pada hari ini, bertepatan dengan Hari Parlemen Internasional, dimana para anggota parlemen dunia menandatangani penolakan aneksasi Israel atas Tepi Barat.



**H. AHMAD SYAIKHU**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI



*Berita kematian selalu  
datang menyesakkan dada.  
Apalagi jika yang wafat  
adalah orang-orang terdekat  
kita. Juga mereka yang  
berjasa besar dalam  
perjalanan hidup kita*

Semoga Allah menempatkan KH. Hilmi Aminuddin di Jannah-Nya. Aamiin ya mujibas salin

Selamat jalan Guruku...



*Selamat  
Jalan  
Guru*



## ***Kenangan Mardani Ali Sera Pada Pesan Cinta Pendiri PKS Hilmi Aminuddin***



**T**elah tutup usia, pendiri sekaligus tokoh Partai Keadilan (PK) yang kini menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Hilmi Aminuddin, pada Selasa (30/6).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendoakan yang terbaik buat almarhum agar senantiasa ditempatkan ditempat terbaik disisi Allah SWT. Mardani juga anggota Komisi II DPR RI memiliki kisah tersendiri dengan Guru Alam KH Hilmi Aminuddin yang telah tutup usia tersebut, tepatnya pada bulan Februari silam.

Mardani menceritakan tentang kisah pertemuannya dengan almarhum yang menitipkan pesan untuk dirinya. Bahwa, cinta dalam beramal harus senantiasa dipegang teguh olehnya dalam berjuang.

"Guru kami Alm KH Hilmi Aminuddin selalu mengajarkan jadikan cinta sebagai dasar dalam beramal. Semua amal dibalut dengan sentuhan cinta akan memberi atsar (dampak) yang menggetarkan," ucap Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Selasa (30/6).



*Guru kami Alm KH Hilmi  
Aminuddin selalu  
mengajarkan jadikan  
cinta sebagai dasar  
dalam beramal*



**Dr. H. MARDANI,  
ALI SERA, M.Eng.**  
*Wakil Ketua BKSAP  
DPR RI*



*Selamat  
Jalan  
Guru*



## Mengenang Ustadz Hilmi Aminuddin

Jakarta, koin24 – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Habib Aboebakar Alhabsy merasakan duka yang mendalam atas wafatnya KH. Hilmi Aminuddin.

“Hari ini Sang Khalik memanggilmu. Mengajakmu beristirahat dari dunia fana Insya Allah Jannah terhampar menyambutmu. Teriring doa dari kami yang berduka,” ujar Habib melalui pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).

Masih teringat jelas dalam benak politisi fraksi PKS ini berbagai nasihat tokoh pendiri PKS sekaligus guru baginya itu. Salah satunya tentang perjalanan dan perjuangan dalam berdakwah di jalan Allah SWT.

“Jalan dakwah itu panjang. Ia dirawat dengan kasih sayang. Disiram dengan keistiqomahan. Diperik dengan penuh perjuangan. Itulah diantara bait nasihatnya yang selalu memberi energi untuk kami. Nasihat teduhmu laksana kasih Ayah. Membuat hangat anak ketika resah,” lanjut Aboe.

Tidak hanya itu, menurut

anggota Komisi III DPR RI ini, almarhum juga banyak mengajarkan tentang makna persaudaraan, hakikat nilai perjuangan, hingga tata sosial kemasyarakatan. Tidak jarang nasihatnya membarakan semangat. Membuatnya selalu menjadi muharrik dakwah.

“Kami diingatkan agar menjadi payung umat. Bergerak dalam barisan untuk memayunginya. Mengingat kembali nasihat Sang Murabbi. Dakwah ini adalah proyeknya Allah, dan kita hanyalah pelaksananya saja. Kalau langkah-langkah kita sesuai dengan irsyadat dan taujihat rabbaniyyah wan-nabawiyah, kita akan dimenangkan oleh Allah SWT, insya Allah,” kenang Aboebakar akan sosok salah satu tokoh negeri sekaligus pendiri PKS ini.

Dari informasi yang dihimpun, KH Hilmi meninggal di RS Santosa Central, Kota Bandung, siang ini.

KH Hilmi Aminuddin merupakan tokoh PKS. Almarhum pernah menjadi ketua Majelis Syuro PKS. (Ayu)



**HABIB ABOE BAKAR  
ALHABSY**  
Ketua MKD DPR RI



*Kami diingatkan agar  
menjadi payung umat.  
Bergerak dalam barisan  
untuk memayunginya.  
Mengingat kembali  
nasihat Sang Murabbi*



*Selamat  
Jalan  
Guru*



*K.H. Hilmi Aminuddin Tutup Usia*

## ***Netty: Beliau Sangat Berjasa atas Kebangkitan Politik Islam***

Jakarta (30/06) --- Pendiri Partai Keadilan (PK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) K.H. Hilmi Aminuddin pada Selasa (30/6) meninggal dunia. Hilmi Aminuddin dikabarkan tutup usia di Rumah Sakit Santosa Central, Bandung, Jawa Barat pada pukul 14.24 WIB.

Anggota Komisi IX DPR RI yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher membenarkan meninggalnya Ketua Majelis Syuro PKS 2005-2015 tersebut.

"Kabar dari internal, beliau meninggal siang ini di Rumah Sakit Santosa Central, Bandung Jawa Barat pukul 14.24 WIB," kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (30/06).

"Kami semua berduka atas wafatnya beliau yang menjadi guru kami. Beliau adalah generasi awal yang mendirikan PK (Partai Keadilan) dan PKS. Beliau sangat berjasa besar untuk kami dan juga perjalanan dakwah di Indonesia," tambah Netty.

Hilmi Aminuddin lahir pada 27 Desember 1947. Pada tahun 1998, Hilmi Aminuddin bersama beberapa rekannya mendirikan Partai Keadilan dan pada tahun 2002 berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hilmi Aminuddin adalah Ketua Majelis Syuro PKS sebelum tahun 2015, yang kemudian digantikan oleh Habib Salim Segaf Al-Jufri. Netty Aher mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan Hilmi Aminuddin.

"Beliau adalah orang yang berjasa untuk kebangkitan dakwah dan politik Islam di Indonesia, serta bagi kami beliau adalah orangtua, guru, pemimpin, sekaligus panutan yang patut diteladani. Kami semua berduka dan amat kehilangan sosok beliau, semoga Allah SWT menerima amal ibadah almarhum dan menempatkan di sisi-Nya yang mulia" tutup Netty.



***Dr. Hj. NETTY  
PRASETIYANI, M.Si***  
*Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI*



*Beliau adalah orang yang berjasa untuk kebangkitan dakwah dan politik Islam di Indonesia, serta bagi kami beliau adalah orangtua, guru, pemimpin, sekaligus panutan yang patut diteladani*





*Selamat  
Jalan  
Guru*



*Iskan Qolba Lubis*

## **Mengenang Ustadz Hilmi Aminudin**

**S**alah satu kekaguman saya dengan Ustadz Hilmi Aminuddin adalah karakter yang kuat, hujjah qura'ni yang tidak tergoyahkan dan pengalaman lapangan.

Penghayatan beliau terhadap al-Qur'an terasa tafsir baru yang tidak kita dapatkan di universitas hatta di timur tengah sekalipun.

Dia tetap berkarakter dan kuat walaupun yang diajak bicara Presiden RI waktu itu, saya teringat dengan sahabat Nabi SAW yang berdiri tegak dan tegas dihadapan Raja Romawiy Rustum tampil tegak dan tegar tidak seperti politis yang salah tingkah dihadapan para Raja.

Karakter yang kuat merupakan ciri pemba-haru dalam sejarah pergerakan di seluruh dunia di setiap zaman

Selamat jalan guru kami, Semoga engkau mendapatkan yang kau cari syahadat di jalan-Nya. Aamiin.



**H. ISKAN QOLBA  
LUBIS, M.A**

*Anggota Fraksi PKS DPR RI*



*Selamat  
Jalan  
Guru*



**Sukamta:**

## ***Ustadz Hilmi Aminuddin yang Saya Kenal***

Indonesia umumnya dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera khususnya, sedang berduka. Mantan Ketua Majelis Syura PKS, KH. Hilmi Aminudin, meninggal dunia hari ini.

Kepergian Beliau adalah sebuah kehilangan besar bagi PKS dan juga Bangsa Indonesia. Semoga tumbuh kader kader tangguh Bangsa dan Partai yang akan melanjutkan estafeta perjuangan dan peran Ustadz Hilmi Aminuddin

Sukamta, Wakil Ketua Fraksi PKS, Selasa (30/6) di Jakarta mengenang almarhum, "Beliau Ustad Hilmi yang saya kenal, pertama adalah seorang guru, pembimbing bagi generasi baru sejak usia beliau masih muda, beliau juga seorang ulama dan dai, kemudian beliau menjadi pendiri Partai Keadilan sekaligus menjadi ketua Majelis Syura pertama Partai Keadilan yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera."

Beliau pribadi yang ramah dan hangat, juga lucu membuat hubungan dengan kami anak-anak muda saat itu

menjadi sangat dekat dan kami merasakan kehangatan hubungan seperti bapak dengan anak-anaknya, kata Sukamta.

Kecerdasan beliau dipadu dengan sikap yang bersahaja membuat kami anak-anak muda waktu itu, merasa dengan mudah mengikuti semua bimbingannya.

Beliau selalu satu kata antara yang beliau ajarkan dan yang beliau praktekkkan, sehingga mudah bagi kami mencontohnya.

"Sikap nasionalisme beliau sangat kuat dengan bingkai keislaman membuat kami sebagai generasi yang lebih muda merasa nyaman di bawah bimbingan Almarhum. Beliau adalah pemimpin, pembimbing, guru dan sekaligus bapak bagi aktivis-aktivis muda bangsa Indonesia. Kita semua bangsa Indonesia berduka, merasa kehilangan salah satu tokoh terbaiknya. Innalillahi wainna ilaihi raaji'uun, selamat jalan, ustaz," ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jakarta, 30-06-2020



**H. SUKAMTA, PhD**  
Wakil Ketua  
Fraksi PKS DPR RI



*Kepergian Beliau adalah sebuah kehilangan besar bagi PKS dan juga Bangsa Indonesia. Semoga tumbuh kader kader tangguh Bangsa dan Partai yang akan melanjutkan estafeta perjuangan dan peran Ustadz Hilmi Aminuddin*



*Selamat  
Jalan  
Guru*



*Bagiku, guru tidak tergantikan.  
Oleh siapapun, oleh apapun.*

*Tidak juga oleh teknologi  
Baik gadget, atau mesin  
pencari secanggih apapun.*

*kita bisa menemukan  
berbagai macam hal yang kita  
ingin ketahui,  
atau menemukan jawaban  
atas berbagai pertanyaan,  
melalui mesin pencari.*

*Bahkan dalam hitungan detik,  
mesin pencari akan  
menyajikan ribuan data hanya  
dengan kita menuliskan kata  
kuncinya.*

*Tetapi mesin tetaplah mesin..  
Ia tidak punya jiwa,  
ia tidak punya ruh,  
ia tidak punya cinta,  
ia tidak punya rasa,*

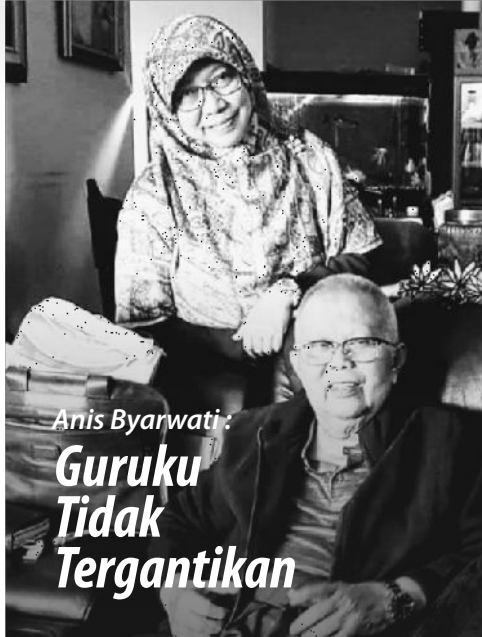
*Mesin hanya melakukan apa  
yang kita perintahkan.*

*Mesin pencari bisa memberi  
kita apapun informasi yang  
kita butuhkan,  
Mesin pencari bisa melakukan  
transfer pengetahuan*

*Tapi ia tidak bisa memilih atau  
memilih untuk kita,  
mana informasi yang baik dan  
berguna, mana informasi yang  
buruk yang justru merusak*

*Mesin tidak punya kemampu-  
an untuk mendidik kita  
Mesin tidak punya  
kemampuan untuk  
membentuk karakter dan  
kepribadian kita.*

*Karena mendidik,  
Membentuk karakter dan  
kepribadian,  
tidak cukup hanya dengan  
memberi informasi berlimpah*



Anis Byarwati:  
**Guruku  
Tidak  
Tergantikan**

*Tidak cukup hanya dengan  
melakukan transfer  
pengetahuan.*

*Mendidik itu perlu cinta,  
perlu keteladanan,  
perlu jiwa yang hidup,  
perlu rasa, perlu ruh..*

*teknologi tidak memiliki  
semua itu.*

*hanya mengandalkan  
teknologi, karakter dan  
kepribadian kita tidak akan  
terbentuk dengan baik.*

*Guru lah yang mampu  
melakukan semuanya,  
dengan keteladanannya*

*dengan sepenuh jiwanya  
dengan segenap cinta yang  
mengalir dalam setiap kata  
yang ia ajarkan*

*Guruku, Hingga kapanpun  
Engkau tidak akan pernah  
tergantikan.*

*Condet, 2 Juli 2020*

\*\*\*\*\*

*Serasa dunia sempat berhenti  
berputar saat mendengar  
engkau berpulang.*

*Terima kasih Bapak, atas  
semua yang telah engkau  
lakukan dan wariskan.*



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

*Terkait Kemarahan  
Presiden pada Menteri*

***Ketua FPKS:  
Isinya sudah  
Kami Suarakan***

*senang dengan marahnya Pak Jokowi. Karena  
sesungguhnya isi marahnya Pak Jokowi itu sudah kami  
suarakan sejak beberapa bulan lalu. Jadi kami merasa  
terwakili oleh Pak Jokowi. Dan saya melihat Pak Jokowi  
itu marahnya serius. Karena isi marahnya itu ditulis, dan  
itu menunjukkan bahwa itu serius marahnya. Kalau  
saya menafsirkan dia serius marahnya*

Terkait Kemarahan Presiden pada Menteri

# Ketua FPKS: Isinya sudah Kami Suarakan

Saya senang dengan marahnya Pak Jokowi. Karena sesungguhnya isi marahnya Pak Jokowi itu sudah kami suarakan sejak beberapa bulan lalu. Jadi kami merasa terwakili oleh Pak Jokowi

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (02/07) — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menanggapi kemarahan yang dilakukan Presiden kepada Menteriya beberapa waktu lalu, dalam Diskusi Dialektika Demokrasi, di Ruang Media Center, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (02/07).

Menurut Jazuli, kemarahan yang dilakukan Presiden kepada Menteriya itu serius dan sudah disuarakan Fraksi PKS beberapa waktu lalu.

"Saya senang dengan marahnya Pak Jokowi. Karena sesungguhnya isi marahnya Pak Jokowi itu sudah kami suarakan sejak beberapa bulan lalu. Jadi kami merasa terwakili oleh Pak Jokowi", ungkap Anggota Komisi

I DPR RI ini.

Di hadapan wartawan, Jazuli menambahkan, kemarahan yang dilakukan Presiden itu sangat serius, karena apa yang menjadi isi kemarahan tersebut ditulis.

"Dan saya melihat Pak Jokowi itu marahnya serius. Karena isi marahnya itu ditulis, dan itu menunjukkan bahwa itu serius marahnya. Kalau saya menafsirkan dia serius marahnya", tuturnya.

Jazuli melanjutkan terkait dengan reshuffle kabinet, Fraksi merasa tau diri karena posisinya sebagai oposisi Pemerintah.

"Maka begitu ada reshuffle saya sebagai pribadi dan institusi Fraksi PKS, tidak elok ikut mengintervensi reshuffle

ini. Itu hak prerogatif Pak Jokowi. Buat kami di PKS reshuffle haknya Pak Jokowi, yang penting siapa yang masuk dan yang diganti, kabinet bisa menjawab tuntutan rakyat," pungkasnya.

Dan pada intinya, lanjut Jazuli, kabinet ke depan bisa menjawab tuntutan dan harapan rakyat. "Memang reshuffle untuk menjawab sesuai dengan janji kampanye Pak Jokowi dan semuanya harus dibuktikan dan dirasakan oleh rakyat," imbuh Jazuli.

Anggota DPR asal Banten ini berharap Presiden jangan hanya berhenti pada kemarahan pada Menteriya saja, akan tetapi harus ada tindak lanjut dari kemarahan tersebut.

"Saya berharap Pak Jokowi tidak selesai pada kemarahan kemarin saja, tapi harus ada tindak lanjut implementasinya. Dan kalau ada implementasinya, saya yakin masyarakat akan menilai baik kepada Pak Jokowi", tutup Jazuli.







FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## ” الدكتور جزولي جويني

رئيس كتلة حزب العدالة والرفاهية في مجلس النواب الإندونيسي

كتلة حزب العدالة  
والرفاهية يدين خطة  
ضم إسرائيل للضفة  
الغربية ووادي الأردن

إن دولة إندونيسيا كانت على الدوام في الجانب الفلسطيني  
في أي وقت. وطالما أن فلسطين لا تزال تعاني من الظلم  
 وانتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني السيء بسبب  
الأعمال البربرية الإسرائيلية منذ عشرات سنين

# Fraksi PKS Kecam Keras Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan

Bangsa dan negara Indonesia selalu berada di pihak Palestina sampai kapan pun. Selama Palestina masih mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan situasi kemanusiaan yang buruk akibat tindakan biadab Israel selama berpuluh tahun

## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (26/06) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengemukakan keras rencana Israel yang pada 1 Juli mendatang akan memulai aneksasi (pencaplokan) wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan. Tindakan Israel ini sudah ratusan kali melanggar hukum internasional, melanggar HAM, serta mengancam stabilitas kawasan dan perdamaian dunia.

"Upaya aneksasi di tengah pandemi Covid 19 dimana kondisi rakyat Palestina di pengungsian sangat memprihatkan, jelas-jelas tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Israel untuk keseki-

ang kali menunjukkan kejinya perlakuan," ungkap Jazuli geram.

Anggota Komisi I DPR RI ini mendukung penuh sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang sudah secara tegas menolak dan melawan rencana tersebut pada Sidang Terbuka Dewan Keamanan PBB pada 24 Juni 2020.

Jazuli meminta Menlu untuk terus mengambil langkah diplomasi yang kuat dalam rangka membela hak-hak rakyat Palestina dan agar dunia tidak diam saja melihat arogansi Israel.

"Bangsa dan negara Indonesia selalu berada di pihak Palestina sampai kapan pun. Selama Palestina masih mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan situasi kemanusiaan yang buruk akibat tindakan biadab Israel selama berpuluh tahun," tegas Jazuli.

Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia (IIFP) ini mendesak negara-negara di dunia untuk tidak lagi menutup mata atas pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional yang dilakukan Israel.

"Tidak cukup mengancam, tidak cukup resolusi-resolusi, perlu langkah nyata negara-negara di dunia secara kolektif melawan arogansi Israel. Kredibilitas badan-badan dunia seperti PBB benar-benar dipertaruhkan dalam hal ini," pungkas Jazuli.





# Aleg PKS Dukung Aksi Kemanusiaan Warga Lancok Selamatkan Pengungsi Rohingya

“Tindakan kemanusiaan ini harusnya menjadi contoh bagi negara lain yang menolak pengungsi Rohingya, karena terusir dari tanah kelahirannya di Myanmar. Ditengah pandemi Covid-19 negara-negara Asia Tenggara semakin enggan menerima perahu pengungsi dari Rohingya

## **KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (01/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mengapresiasi tindakan para nelayan Desa Lancok, Kabupaten Aceh Utara yang saat ini menjadi sorotan dunia.

Pasalnya, bersama warga desa, mereka bahu-membahu menyelamatkan 99 orang pengungsi asal Rohingya yang terombang-ambing di perairan Aceh Utara.

“Tindakan kemanusiaan ini harusnya menjadi contoh bagi negara lain yang menolak pengungsi Rohingya, karena terusir dari tanah kelahirannya di Myanmar. Ditengah pandemi Covid-19 negara-negara Asia Tenggara semakin enggan menerima perahu pengungsi dari

Rohingga,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI ini.

Anggota asal Fraksi PKS ini pun menambahkan, kendati demikian, warga Desa Lancok, Aceh Utara atas dasar rasa kemanusiaan dan bagian dari tradisi Komunitas Nelayan Aceh Utara kemudian berinisiatif menyelamatkan para pengungsi Rohingya yang sudah berminggu-minggu terombang-ambing di lautan. Hingga kapal pengungsi yang rusak ini terdampar ke perairan Aceh Utara.

“Alhamdulillah, oleh Pemerintah setempat para pengungsi difasilitasi untuk menjalani rapid test. Hasilnya, semua dinyatakan non-reaktif terhadap virus Covid-19. Para

pengungsi yang sebagian besar terdiri dari wanita dan anak-anak sementara waktu ini ditempatkan dibekas kantor imigrasi”, jelasnya lagi.

Beredar kabar bahwa Pemerintah Pusat akan mengembalikan 99 orang pengungsi Rohingya ini ke laut dengan memberi perbekalan berupa bensin perahu, pakaian dan makanan.

Menanggapi hal tersebut, para nelayan melakukan protes di kantor pemerintah daerah setempat. Mereka menegaskan, para nelayan akan tetap menerima warga Rohingya yang mengungsi, meskipun tidak memiliki izin dari pemerintah.

“Fraksi PKS mendukung aksi kemanusiaan dan kepedulian warga Desa Lancok Aceh Utara terhadap para pengungsi Rohingya, yang dengan sepuh hati mereka bahu-membahu menyelamatkan puluhan nyawa saudaranya. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan terbaik.”, ujar Toriq.

Aksi Kemanusiaan warga Desa Lancok kemudian menggugah LSM-LSM kemanusiaan di Indonesia untuk turut memberikan bantuan dan penanganan kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya.



## Data Penduduk Tes Covid-19 Bocor?

# Sukamta: Negara Harus Tegakkan Hukum!

jika kasus ini benar-benar terjadi, apakah ini karena kebodohan akan IT dari pihak pengelola, atau karena ketidak tahuan hukum bahwa data-data itu harus dilindungi, atau karena kesembronoan dan kelalaian. Itu berarti adanya dugaan keteledoran pengelola negara atas amanah data-data pribadi pasien Covid-19 maupun data NIK.

### H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Yogyakarta (25/06) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menanggapi dugaan kebocoran data penduduk yang menjalani tes Covid-19, melalui telepon selulernya, Kamis (25/06).

Menurut Sukamta, jika kasus ini benar-benar terjadi, apakah ini karena kebodohan akan IT dari pihak pengelola, atau karena ketidak tahuan hukum bahwa data-data itu harus dilindungi, atau karena kesembronoan dan kelalaian.

"Itu berarti adanya dugaan keteledoran pengelola negara

atas amanah data-data pribadi pasien Covid-19 maupun data NIK. Pertanyaannya kemudian, data pribadi dan penting apa lagi yang ditaruh sembarangan? Jika kasus ini terbukti, negara harus tegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kasus-kasus serupa yang terus berulang bisa jadi mengindikasikan lemahnya hukum kita dalam hal ini," tegas Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan bahwa hal ini tidak bisa ditoleransi karena sudah berulang kali.

"Pejabat pemerintah selalu

mengingkari. Ada yang mengatakan datanya aman, ada yang mengatakan tidak memberi akses kecuali hanya konfirmasi," urainya.

Faktanya, Sukamta melanjutkan, data-data tersebut mungkin memang tidak pernah dihack atau dibajak, sehingga dinyatakan aman. Padahal kenyataannya data memang disimpan ditempat terbuka sehingga tidak perlu hacker dan cracker untuk menemukannya.

"Jangan-jangan penjual data publik itu hanya ingin mengingatkan kita akan keteledoran ini. Sekarang justru yang perlu diusut adalah penyelenggara negara atau pengelola data-data tersebut," katanya.

Langkah paling mungkin terkait data pribadi di instansi-instansi pemerintah segera terupdate dan sulit diretas.

Kemudian, imbuhnya, negara harus memberikan pendidikan tentang pentingnya data pribadi ini ke setiap warganya, termasuk juga kepada para pegawai



pemerintah. Tak lupa, dalam aspek hukum, jika ada kasus kejahatan yang melanggar hak data pribadi, maka tuntaskan kasusnya menggunakan instrumen hukum yang sudah ada, setidaknya ada 32 Undang-Undang yang mengatur soal perlindungan data pribadi. Kita juga memiliki Peraturan Pemerintah tentang ini.

"Sementara itu kita juga sedang siapkan seperangkat aturan yang lain seperti RUU Pelindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Semoga cepat rampung untuk bisa mewujudkan ranah digital yang aman," harap wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Sebagaimana diberitakan

sebelumnya, bahwa adanya dugaan kebocoran data penduduk yang menjalani tes Covid-19.

Kasus ini diduga berawal dari data pasien tes Covid-19 yang dapat diakses publik lewat internet dan diperjual belikan. Dari penelusuran sederhana lewat mesin pencari, ternyata data data ini termasuk data NIK memang ditaruh sembarangan di tempat terbuka sehingga orang bisa mengakses data-data tersebut dengan mesin pencari.

Kalau kita ketik nama dan alamat di mesin pencari, maka akan didapat nama, alamat bahkan data sata pribadi seperti NIK, di website Pemerintah.

## Wacana Pilkada Asimetris

# Teddy Setiadi: Pendidikan Politik Kita Masih Rendah

Selama ini masyarakat ingin ikut andil dalam menentukan pemimpin atau perwakilannya tetapi karena pendidikan politik yang tidak baik dari peserta pemilu masyarakat sendiri yang menjadi korban. Jadi kalau suatu daerah dinilai kurang siap untuk pemilu langsung mau sampai kapan dibiarkan tidak siap? Jangan-jangan nanti akan dibiarkan terus supaya menguntungkan segelintir orang. Itu yang menurut saya harus dievaluasi

### TEDDY SETIADI, S.Sos.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (25/06) — Anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menanggapi wacana pilkada asimetris yang digulirkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Dalam tanggapannya Teddy menyampaikan bahwa kemungkinan pilkada asimetris ini adalah fakta yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang belum siap dan tidak

dipersiapkan dalam menghadapi pemilu langsung.

Sebagaimana diketahui dalam wacana pilkada asimetris ini nantinya memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada antar daerah. Perbedaan tersebut muncul karena kekhususan aspek administrasi, budaya, ataupun aspek strategis lainnya. Pemilihan langsung

hanya akan digelar di daerah yang dinilai siap secara indeks pembangunan manusia, kemampuan fiskal, dan kondisi sosial masyarakat. Sementara daerah yang dinilai kurang siap maka dilakukan pemilu tidak langsung," papar Teddy.

Menanggapi itu semua, Teddy mengatakan bahwa selama ini baik pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun peserta pemilu sendiri belum maksimal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga polarisasi masyarakat karena perbedaan pilihan politik semakin dalam, money politic, black campaigne dan masalah sosial lainnya pun banyak dijumpai.

"Pertama yang perlu dievaluasi adalah pendidikan politik kita masih rendah, upaya pendidikan politik yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu seperti apa? Juga pengawasan kepada peserta pemilu bagaimana? Agar kekhawatiran berubahnya bentuk kecurangan yang terjadi dalam pilkada langsung maupun tidak langsung dapat diantisipasi, bukan sebagai



upaya untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu," ungkapnya.

Kedua, lanjut Teddy, Selama ini peserta pemilu juga mendidik para pemilih dengan pendidikan politik yang tidak baik, seperti money politic, black campaigne, dan upaya-upaya tidak baik lainnya kepada masyarakat sehingga polarisasi masyarakat karena perbedaan pilihan politik semakin dalam.

"Selama ini masyarakat ingin ikut andil dalam menentukan pemimpin atau

perwakilannya tetapi karena pendidikan politik yang tidak baik dari peserta pemilu masyarakat sendiri yang menjadi korban. Jadi kalau suatu daerah dinilai kurang siap untuk pemilu langsung mau sampai kapan dibiarkan tidak siap? Jangan-jangan nanti akan dibiarkan terus supaya menguntungkan segelintir orang. Itu yang menurut saya harus dievaluasi." Pungkas teddy



# Mardani Desak Bawaslu Perkuat Pengawasan Penyelewengan Bansos Covid-19

“Saya mendesak Bawaslu Pusat segera membuat surat edaran kepada jajarannya, dari atas sampai bawah untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi penyelewengan program stimulus Covid-19 untuk kepentingan pemenangan pilkada 2020,”

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (25/06) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) minta Bawaslu RI memperkuat pengawasan penyelewengan bantuan sosial (Bansos) program stimulus Covid-19 untuk pemenangan Pilkada 2020.

“Saya mendesak Bawaslu Pusat segera membuat surat edaran kepada jajarannya, dari atas sampai bawah untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi penyelewengan program stimulus Covid-19 untuk kepentingan pemenangan

pilkada 2020,” kata Mardani, Senin (22/06/2020).

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu juga mengatakan banyak melihat dan mendapatkan aduan gugatan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan ini oleh pejabat daerah petahana.

“Sudah banyak bukti dan aduan yang saya terima seperti di Banten dan Jawa Tengah yang menempelkan stiker di hand sanitizer dan bansos lainnya dengan foto pribadi,” kata Mardani.

Mardani minta Bawaslu menindak tegas kepada para kepala daerah yang curang itu.

“Saya minta Bawaslu Tegas! kalau perlu bila terbukti bisa di rekomendasikan untuk ditolak atau dicoret sebagai

calon peserta Pilkada 2020,” tegasnya.

Legislator Fraksi PKS itu minta juga minta kepada pada kepala daerah atau walik kepala daerah yang petahana yang akan maju tidak di tunjuk sebagai ketua tim gugus tugas penanganan Covid-19 di daerahnya.

“Secara etika dan prinsip keadilan, Saya juga mendesak Pemerintah dalam hal ini, Kemendagri mengganti kepala daerah atau wakil kepala daerah petahana yang menjadi ketua gugus tugas di daerah yang akan maju dalam kontestasi pilkada Desember 2020,” pungkasnya.



## Maklumat Kapolri Terkait Penanganan Covid-19 Dicabut

# Habib Aboe: Protokol Kesehatan Wajib Diperhatikan

dicabutnya Maklumat Kapolri bukan berarti kita semua bebas mengumpulkan massa. Saya minta Polri berkoordinasi dengan para Kepala Daerah yang sekaligus ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

### HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (27/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsy menanggapi soal dicabutnya maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis, terkait larangan dan upaya pembubaran terhadap kerumunan terkait pencegahan penularan Covid-19.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, pencabutan maklumat tersebut, tentunya disesuaikan dengan kebijakan New Normal yang diterapkan Pemerintah pusat.

"Saya memaklumi langkah

Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19. Sepertinya ini mengikuti kebijakan pemerintah yang menuju new normal," pungkas Anggota Komisi III DPR RI ini.

"Namun saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan

bijak. Jangan sampai ada euforia yang dapat membuat second wave dari Covid-19", imbuhnya.

Kenyataan di lapangan, kata Habib Aboe, masih banyak zona merah, bahkan ada yang sampai zona hitam.

"Tentunya ini gak bisa sembarangan, protokol kesehatan harus dipatuhi, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang," urainya.

Menurut Habib Aboe, Keberhasilan kita melawan penyebaran Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan kita.

"Oleh karenanya, dicabutnya Maklumat Kapolri bukan berarti kita semua bebas mengumpulkan massa. Saya minta Polri berkoordinasi dengan para Kepala Daerah yang sekaligus ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," tandasnya.

Kebijakan-kebijakan daerah yang mereka buat, lanjutnya, harus selalu didukung oleh Polri. Termasuk penertiban jaga jarak di tempat umum.

"Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraan tertib masyarakat," imbuah Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.





Hari Bhayangkara ke 74

# Momentum di Masa Pandemi Wujudkan Polisi Profesional yang Melayani

Semoga Polri meningkatkan profesionalitasnya terutama dalam memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia!

**Drs. H. ADANG DARADJATUN**

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (01/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun mengucapkan selamat Hari Bhayangkara 1 Juli 2020 kepada pimpinan dan segenap anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Adang berharap semoga institusi Polri kedepan semakin profesional dan mampu melayani masyarakat dengan maksimal.

"Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 74 semoga kedepan Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin profesional di dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam menegakkan hukum!" ujar Adang Daradjatun di Jakarta (01/07).

Adang Wakil Kepala Kepolisian Indonesia tahun 2004 - 2006 ini mengutarakan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini, Polri berperan dalam mendisiplinkan masyarakat, terutama untuk mematuhi PSBB dan protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Usaha mereka patut diapresiasi

"Apresiasi untuk Polri dan

jajarannya. Tanpa ada pihak kepolisian mustahil kita bisa melaksanakan itu, peran mereka begitu sentral." ujar Adang Daradjatun.

Adang juga melihat bahwa penanganan Polri dalam pandemi Covid-19 juga tidak bertindak represif, tetapi lebih mengedepankan pendekatan pengayoman. Akibatnya, upaya-upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran ini tidak menimbulkan gejala sosial yang begitu besar.

amun, di sisi lain, kinerja Polri juga perlu terus diperbaiki



dan ditingkatkan. Khususnya terkait ada sejumlah laporan dari masyarakat sipil yang mana kritik dan kebebasan mereka di represi, terutama oleh oknum jajaran polisi sendiri. Menurut Adang, hal ini akan mencoreng nama institusi kepolisian terutama dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.

"Saya yakin bahwa Polri dan mayoritas jajarannya masih berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi. Namun, Polri harus membenahi oknum jajaran

mereka agar tidak mencoreng nama baik institusi kepolisian" ujar Adang.

Terakhir, Adang berharap agar Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalitasnya.

"Semoga Polri meningkatkan profesionalitasnya terutama dalam memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia!" pungkas Adang.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Hari Bhayangkara ke 74*

## ***Momentum di Masa Pandemi Wujudkan Polisi Profesional yang Melayani***

*Semoga Polri meningkatkan profesionalitasnya  
terutama dalam memberikan pengayoman,  
perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.  
Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia!*

***Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun***

*Anggota Komisi III DPR RI  
Wakapolri 2004 - 2006*

## NTP dan NTN Jadi Indikator Penyusunan RAPBN 2021

# Aleg PKS: Anggaran Harus Diperhatikan

ketika NTP dan NTN menjadi indikator dalam penyusunan RAPBN 2021, sudah selayaknya program Kementerian Pertanian (Kementan) tidak mengulang program sebelumnya. Program Kementan dengan seluruh dirjenya seharusnya tidak meng-copy paste. Tapi harus mengacu kepada kesejahteraan petani. Jadi tidak sekedar mengacu kepada berapa produksi yang dihasilkan,

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (02/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet mengatakan, ketika Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijadikan salah satu indikator untuk penyusunan RAPBN 2021, maka persoalan anggaran bagi pertanian harus diperhatikan.

"Dalam ruangan ini saya menyampaikan kepada Presiden, harusnya tidak dikurangi dan tidak ada pemotongan untuk anggaran pertanian. Bahkan harusnya

ditambah. Awalnya tahun kemarin 21 Triliun menjadi 14 triliun, sekarang patutnya menjadi 17 T atau 18 T," kata Slamet, Rabu (01/07/2020).

Slamet menjelaskan, ketika NTP dan NTN menjadi indikator dalam penyusunan RAPBN 2021, sudah selayaknya program Kementerian Pertanian (Kementan) tidak mengulang program sebelumnya.

"Program Kementan dengan seluruh dirjenya seharusnya tidak meng-copy paste. Tapi harus mengacu kepada kesejahteraan petani.

Jadi tidak sekedar mengacu kepada berapa produksi yang dihasilkan," tukas Slamet.

Selain itu, sambung Slamet, pihaknya mengusulkan Kartu Tani tidak perlu juga diberikan kepada setiap petani. Bisa saja, lanjut Slamet, kartu tani dipersiapkan untuk satu kelompok.

"ada kendala teknis dari para petani terkait kemampuan dan mental dari petani. Ini juga terkait dengan kendala keterpaksaan para petani menjadi petani," tegasnya.



# Aleg FPKS Minta Pemerintah Fokus pada Pemulihan dan Pembangunan Sektor Pertanian

Saya mengingatkan kepada pemerintah agar lebih ketat dalam implementasi aturan yang disepakati dan efisien, efektif dalam pengelolaan anggaran sehingga cita-cita bersama membangun sektor pertanian yang unggul dapat segera terwujud

**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (29/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Asai Wonogiri, Hamid Noor Yasin, mengingatkan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, bahwa kinerja pangan dan pertanian saat ini banyak terbentur masalah anggaran dan regulasi.

Target kerja tahun 2021 yang disampaikan Menteri Pertanian pada Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin lalu, (22/6/2020) diakui oleh Hamid sebagai acuan konstruktif karena pemerintah hendak mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Akan tetapi, lanjut Hamid, hingga saat ini, regulasi untuk kerja dan kinerja di lapangan

dan keputusan-keputusan anggaran yang menyertainya, kerap kali tidak sesuai sehingga dari tahun ke tahun, semua tujuan sektor pangan dan pertanian hanya sekedar cita-cita.

"Kita ini bila dirunut sejarah di parlemen, sudah begitu banyak produk kebijakan legislasi yang pro kepada sektor pertanian dan pangan. Tapi hingga ada yang bertahun-tahun, seperti undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Perliundungan dan Pemberdayaan Petani yang sejak 6 Agustus tahun 2013 di sahkan, hingga kini implementasinya tidak ada", terang Hamid.

Politisi PKS ini menambahkan, ada juga Undang-undang nomor 19 tahun 2012 tentang

pangan yang disusun dengan penuh perdebatan sana-sini untuk menyusun kebijakan yang mendekati ideal.

Tapi pada kenyataan hingga sekarang, impor pangan masih marak dan padahal amanatnya adalah meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan melindungi dan mengembangkan kekayaan



sumber daya Pangan nasional.

"Untuk persoalan legislasi kita ini mesti konsisten terlebih dahulu agar tujuan mulia Pemulihan dan Pembangunan Sektor Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern dapat di realisasikan. Belum lagi persoalan anggaran untuk pangan yang tidak memadai", ungkap Hamid.

Anggota DPR Komisi IV yang juga di BURT DPR ini mencontohkan kebijakan cetak

sawah yang berubah-ubah hingga menjadi Nol Rupiah.

Begitu juga kebijakan sektor pangan yang mengalami depresiasi aloksi dari APBN dari 21 T menjadi sekitar 14 T. Meski tahun 2021 akan ada kenaikan, tetapi di ujian wabah corona ini masih membayangi untuk menjadikan kita tetap waspada.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

# Hermanto: Beri Bulog Tugas Menyalurkan Beras, agar APBN Tidak Mubazir

Saat ini Bulog diberi dana dari APBN untuk beli beras tapi tidak disertai kewenangan menyalurkan. Akibatnya terjadi penumpukan stok beras di gudang. Karena lama disimpan maka terjadi penurunan kualitas. Kualitas turun, harga turun. Ini kemubaziran APBN

**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (25/06) — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto mendesak Pemerintah agar memberi Bulog kewenangan penuh menyalurkan beras terutama untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako serta beras untuk PNS, TNI dan Polri.

Menurut Hermanto, Kewenangan penyaluran ini penting agar APBN yang dikeluarkan untuk beli beras tidak mubazir.

"Saat ini Bulog diberi dana

dari APBN untuk beli beras tapi tidak disertai kewenangan menyalurkan. Akibatnya terjadi penumpukan stok beras di gudang. Karena lama disimpan maka terjadi penurunan kualitas. Kualitas turun, harga turun. Ini kemubaziran APBN", papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, sudah terjadi. Beras tersimpan lama, terus mengalami penurunan kualitas dan mengalami pembusukan.

Beras tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

"Beras tersebut selanjutnya dianggap kadaluarsa. Ini kemubaziran APBN", tandas legislator Fraksi PKS ini.

"Kalau beras sampai kadaluarsa apalagi busuk maka biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan sewa gudang jadi mubazir. Ini juga kemubaziran APBN", tambahnya.

Akibat pandemi covid-19, katanya, kita mengalami defisit APBN. "Karena itu, APBN yang tersedia harus digunakan secara efektif dan efisien. Buat kebijakan yang tepat agar APBN tidak hilang sia-sia", tutur Hermanto.

"Buat kebijakan sehingga Bulog punya kewenangan yang komprehensif dalam hal membeli dan menyalurkan beras sehingga APBN tidak terbuang percuma", pungkas legislator dari dapil Sumbar I ini.

Saat ini, program Beras Sejahtera (Rastra) yang dahulu menjadi pangsa pasar khusus



bagi Bulog dalam menyalurkan berasnya, telah diganti dengan BPNT. Dalam program BPNT, pemerintah tidak menugaskan secara langsung Bulog sebagai penyedia beras tunggal. Hanya diimbau untuk memakai beras Bulog.

Perum Bulog berencana untuk terus meningkatkan penyaluran beras komersial dalam BPNT. Tahun ini, Bulog menargetkan bisa menyalurkan beras BPNT kepada para penerima manfaat hingga 500 ribu ton.



# Anggota FPKS Kritik Rencana Pemerintah Bentuk Badan Cadangan Pangan Strategis

Jika pemerintah ingin membuat sebuah badan atau Lembaga pangan baru maka seharusnya mengacu kepada Undang-Undang tentang Pangan, yang telah mengamanatkan pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional. Yang ditunggu oleh rakyat itu adalah Badan Pangan Nasional, tapi sampai hari ini pemerintah belum mampu merealisasikan perintah undang-undang tersebut

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (25/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengkritik rencana pemerintah yang akan membentuk badan cadangan pangan strategis untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.

Johan mengungkapkan bahwa jika pemerintah ingin membuat sebuah badan atau Lembaga pangan baru maka

seharusnya mengacu kepada Undang-Undang tentang Pangan, yang telah mengamanatkan pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional.

"Yang ditunggu oleh rakyat itu adalah Badan Pangan Nasional, tapi sampai hari ini pemerintah belum mampu merealisasikan perintah undang-undang tersebut," ungkap

Johan.

Legislator dari Fraksi PKS ini menilai jika pemerintah ingin memiliki cadangan pangan strategis untuk memenuhi kebutuhan nasional maka Badan Pangan Nasional bisa menjadi salah satu solusi penting bagi Indonesia.

"Tujuan Badan ini, tentunya agar terhindar dari krisis pangan nasional, karena badan pangan ini berdiri langsung di bawah koordinasi presiden sehingga keputusan-keputusan mendasak dalam berbagai situasi, terutama merespon gejolak pangan akan segera dapat dilakukan," ujar Johan.

Disamping itu, lanjut Johan, pembentukan badan pangan ini menurut UU No.18/2012 tentang Pangan, agar kebijakan pangan lebih terarah, terencana dan sesuai dengan visi keadilan pangan Indonesia.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini menilai tata kelola pangan dalam keadaan darurat tidaklah mesti dalam bentuk badan cadangan pangan yang dikelola oleh militer.



"Namun dengan memperkuat sistem ketahanan pangan secara komprehensif melalui Badan Pangan Nasional akan membuat Indonesia memiliki ketahanan dan kemandirian pangan yang lebih baik," tegas Johan.

Politikus Senayan dari Pulau Sumbawa ini berharap bahwa Presiden bisa melihat pentingnya keberadaan Badan Pangan Nasional ini, karena bisa mengurus tata kelola semua komoditas pangan dan tidak terpaku hanya pada

pengelolaan cadangan beras pemerintah seperti yang dilakukan Bulog saat ini.

"Saya mendorong saatnya pemerintah segera memperbaiki sistem cadangan pangan kita, termasuk dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga pangan, menjaga tata niaga pangan yang berpihak kepada petani, serta memperbaiki kebijakan penyaluran pangan agar tidak ada lagi daerah yang mengalami kekurangan stok pangan," tutup Johan.





# Ahmad Syaikhul Minta BMKG Tingkatkan Kinerja

“Perlu menjadi perhatian, kiranya fungsi BMKG juga bermanfaat langsung bagi sektor lain maupun masyarakat secara umum dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini yang masih berlangsung. Beberapa daerah mengalami cuaca ekstrem sehingga perlu penyesuaian aktivitas dan antisipasi yang cepat dari pihak terkait

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (22/06) — Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhul meminta jajaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dapat terus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat meningkatkan kapasitas sebagai lembaga yang bermanfaat secara langsung bagi sektor-sektor lainnya maupun masyarakat secara umum. Khususnya, di tengah kondisi saat ini, dimana seluruh elemen bangsa menghadapi pandemi Covid-19 yang masih melanda Tanah Air.

Pemaparan tersebut disampaikan Syaikhul saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG, Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang digelar secara fisik dan virtual, Senin (22/6/2020).

“Perlu menjadi perhatian, kiranya fungsi BMKG juga bermanfaat langsung bagi sektor lain maupun masyarakat secara umum dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini yang masih berlangsung. Beberapa daerah mengalami cuaca ekstrem sehingga perlu penyesuaian aktivitas dan antisipasi yang cepat dari pihak terkait,” ujar Syaikhul.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengingatkan

BASARNAS ke depannya agar akurasi pencapaian target realisasi benar-benar dapat dijaga, sehingga sampai pada akhir tahun bisa tercapai dengan baik. Sebab, ungkap mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu, ia mengapresiasi realisasi anggaran BASARNAS pada tahun sebelumnya di tahun 2019 berhasil mencapai 98,8 persen.

Tak hanya itu, Syaikhul menyoroti backflow antara pagu kebutuhan dan pagu indikator yang hampir mencapai Rp 2 Triliun. Mengingat, menurut Syaikhul, hal itu akan sangat berpengaruh seperti dalam pengembangan SDM di sektor pencarian dan pertolongan dimana jumlahnya berkurang sangat drastis hingga 50 persen. Terkait hal itu, ia mendesak BASARNAS untuk fokus pada pelayanan dasar.

“Padahal, SDM di sektor pencarian dan pertolongan awalnya 10 ribu orang kini hanya 5 ribu saja. Tentu, kita tidak menginginkan adanya penurunan kualitas pelayanan oleh BASARNAS. Nah, saya mohon kebijakan tersebut kiranya bisa dipertimbangkan kembali,” tegas Legislator daerah pemilihan Jawa Barat VII itu.



# Legislator PKS Tagih Janji Pemerintah Pangkas Impor Bahan Baku Obat

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan road map (peta jalan) kemandirian BBO dari pemerintah maupun holding BUMN Farmasi. Seharusnya, adanya pandemic covid-19 ini menjadi momentum kebangkitan BBO berbasis sumber daya lokal

## AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (01/07) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menagih janji pemerintah yang akan memangkas impor bahan baku obat (BBO) yang jumlahnya mencapai lebih dari 90% dari kebutuhan BBO per tahun.

Menurut Amin, tingginya impor BBO selain menghabiskan devisa negara mencapai US\$2,7 miliar atau setara Rp 37,8 triliun per tahun, juga ada risiko tinggi terkait kehalalannya.

Impor BBO terbesar, lanjutnya, berasal dari China yang mencapai 60% dari total

impor, selebihnya dari India dan negara lainnya.

Wakil rakyat dari Daerah Istimewa (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu pun mendesak agar regulasi terkait tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada industri farmasi nasional direalisasikan.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan road map (peta jalan) kemandirian BBO dari pemerintah maupun holding BUMN Farmasi.

Seharusnya, adanya pandemic covid-19 ini menjadi momentum kebangkitan BBO berbasis sumber daya lokal,” kata Amin.

Menurut Amin, Nusantara kita sangat kaya dengan keanekaragaman obat dan bahan bakunya, maupun metode pengobatannya.

Kementerian Kesehatan, katanya, mengidentifikasi ada 30 ribu jenis tanaman herbal dengan 1/3 nya bisa dijadikan BBO. Belum termasuk sumber BBO lainnya baik dari hewan seperti madu, maupun dari sumber daya laut yang belum banyak digali.

“Ini bagaimana BUMN Farmasi kita mau memperkuat riset agar kita mandiri BBO, lha piutang mereka baik di pemerintah, BPJS maupun rumah sakit milik pemerintah belum juga dibayar,” sindir Amin.

Berdasarkan data BUMN Kimia Farma misalnya, pemerintah belum melunasi utangnya ke BUMN tersebut sebesar Rp300 miliar. Selain pemerintah pusat, BPJS Kesehatan, sejumlah rumah sakit pemerintah, dan pemerintah daerah juga berutang sebesar Rp2,2 triliun



kepada Kimia. Hal itu pastinya berdampak pada kesehatan keuangan BUMN tersebut.

“Laporan perusahaan tersebut mengungkapkan, jumlah pinjaman modal kerja per 30 April 2020 sebesar Rp 4,4 Triliun untuk membiayai piutang dan persediaan, dan pinjaman untuk investasi sebesar Rp 3,6 Triliun dengan suku bunga komersial, di mana sejumlah Rp400 Miliar akan jatuh tempo pada bulan September 2020,” paparnya.

Di sisi lain, lanjutnya, bangsa kita sedang berperang

melawan pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Kita pastinya membutuhkan banyak stok obat-obatan maupun alat kesehatan termasuk alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.

“Saya minta pemerintah baik pusat maupun daerah, juga BPJS agar segera melunasi utang mereka kepada Kimia Farma, karena ini menyangkut hajat hidup rakyat di sektor kesehatan,” pungkas Amin.

# Legislator PKS Minta Kemenperin Berperan dalam Antisipasi Gelombang PHK

Semoga Pemerintah merealisasi usulan komisi VI pada dukungan anggaran kementerian perindustrian sehingga kemenperin harus menerima tantangan untuk mengurangi pengangguran dengan membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja bidang industri kerakyatan

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (25/06) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina setelah rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian beserta jajaran, meminta agar kementerian perindustrian berpartisipasi aktif mencegah atau mengurangi gelombang PHK hingga dua tahun kedepan.

Menurut Nevi, Gelombang PHK yang sudah mulai marak akhir-akhir ini, sebagai dampak berlanjutnya wabah corona telah memukul sektor ekonomi baik perusahaan besar hingga kecil, baik swasta maupun

perusahaan plat merah.

Rapat kerja yang membahas rencana anggaran tahun 2021 Kemenperin ini menjadi acuan pelaksanaan program yang bukan saja memperkuat industri besar, namun menjadi jalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah untuk minimal bertahan di tengah wabah.

Campur tangan Pemerintah ini, menurut Nevi sebagai alasan kuat agar pemerintah memberikan tambahan anggaran Kemenperin tahun 2021 dimana pagu indikatif

sebesar Rp. 2,423 Miliar.

"Saya berharap, impor bahan baku dan bahan penolong sektor industri yang masih tinggi dengan nilai impor tahun 2019 sebesar 126 Milyar USD di tahun mendatang dapat dikurangi. Rendahnya efektivitas kebijakan dalam keterbatasan ruang fiskal juga mesti dapat di atasi. Tujuan pentingnya adalah pengurangan tenaga kerja sektor industri tidak lagi menjadi isu berat pada suasana wabah ini", jelas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengungkapkan, hasil rapat komisi VI dengan kementerian perindustrian memiliki kesepakatan untuk menentukan penerimaan Pagu Indikatif Anggaran Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2021.

Besarannya, berdasar Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02.01/05/2020 tanggal 8 Mei 2020



senilai Rp 2,596 Triliun.

Kecilnya anggaran kementerian di antara mitra komisi VI sangat disayangkan oleh Politisi PKS ini, karena seharusnya kemenprin dapat berbuat lebih banyak untuk memajukan industri dalam negeri.

Untuk itu, Nevi sangat sepakat dengan seluruh anggota komisi VI yang lain untuk mendukung dan memperjuangkan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian RI Tahun 2021 sebesar Rp. 3,428 Miliar karena

diperlukan untuk pemulihan industri Pasca Covid-19.

"Semoga Pemerintah merealisasi usulan komisi VI pada dukungan anggaran kementerian perindustrian sehingga kemenperin harus menerima tantangan untuk mengurangi pengangguran dengan membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja bidang industri kerakyatan", ucap Nevi.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

# Tinjau Ulang Rencana Penghapusan BBM Jenis Premium, Pertalite dan Solar Denan CN 48!

“Kajian ini harus dilakukan secara detail oleh Pertamina. Tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Termasuk menimbang dampak negatifnya di masyarakat jika penghapusan tiga jenis BBM ini dilakukan”

## SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (01/07) — Pertamina berencana akan menghapus BBM yang tidak ramah lingkungan. Oleh Pertamina, BBM yang disebut tidak ramah lingkungan antara lain bensin dengan nilai oktan rendah dan solar dengan nilai setana rendah.

Jika demikian, maka bensin jenis premium (RON 88) dan pertalite (RON 90) serta solar dengan CN 48 tidak akan diperjualbelikan lagi di SPBU secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menyebut, rencana Pertamina tersebut merujuk pada Peraturan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) No 20 Tahun 2017. Pemerintah berالasan bahwa penghapusan BBM tidak ramah

lingkungan tersebut disebabkan karena BBM dengan RON dan CN rendah hanya digunakan untuk mesin dengan compression ratio yang rendah.

Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Perpres 191/2014 yang membatasi distribusi Premium di Jawa, Madura, dan Bali sekaligus mencabut subsidiya.

Namun rencana ini, tidak sepenuhnya diadani oleh Anggota Komisi VII DPR, Saadiah Uluputty. Saadiah menegaskan, kebijakan penghapusan premium, pertalite, dan solar denan CN 48 dilakukan pada saat ini, tidak tepat.

“Ketiga jenis BBM tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang terpuruk dengan pandemic Covid-19”, tegas Saadiah kepada wartawan

(30/06/2020).

Dia meminta, Pertamina tidak asal hapus ketiga jenis BBM tersebut tanpa memberikan alternatif BBM yang ramah lingkungan dengan harga yang murah.

“Masyarakat masih menilai bahwa harga Pertamina dan Pertamina DEX masih sangat mahal dibandingkan Premium, Pertalite dan solar, sehingga akan sangat memberatkan apabila dipaksa untuk beralih kesana”, Saadiah berargument.

Saadiah bersuara, mendesak agar Pertamina meninjau ulang rencana penghapusan BBM dengan RON dan CN rendah untuk saat ini.

Saadiah menandakan masyarakat masih menghadapi dampak COVID-19 yang memukul seluruh aspek kehidupan.

“Penghapusan tiga jenis BBM tersebut akan menambah beban masyarakat, di tengah kondisi sulit akibat dampak covid-19”, kata Saadiah.

Anggota DPR RI asal Maluku ini meminta agar Pertamina melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, terhadap alasan diambil kebijakan tersebut.

“Kajian ini harus dilakukan secara detail oleh Pertamina.



Tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Termasuk menimbang dampak negatifnya di masyarakat jika penghapusan tiga jenis BBM ini dilakukan”, imbuhnya.

Politisi PKS ini juga meminta agar Pertamina lebih aktif menyosialisasikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebelum memutuskan menghilangkan Pertalite dan Premium

Sebut Saadiah, jika dalam waktu tertentu Pertamina ingin

ada peralihan pola konsumsi BBM masyarakat dari yang biasa menggunakan BBM berbahaya ke BBM ramah lingkungan, sebaiknya dibuat rencana kerja khusus untuk merealisasikan rencana tersebut dan disampaikan dengan cukup baik kepada masyarakat.

“Agar tidak terjadi kepanikan publik yang akan mempengaruhi kondusifitas dalam negeri”, paparnya.

# Fraksi PKS Perjuangkan Tidak Dicabutnya Subsidi Gas 3 Kg hingga Ditambah

Fraksi PKS akan terus mengawal keputusan tersebut hingga tingkat pembahasan paling akhir. Kami sangat yakin keputusan tersebut akan diterima dan disetujui karena terkait kepentingan rakyat banyak

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (01/07) — Upaya Fraksi PKS DPR RI mempertahankan subsidi gas melon 3 kg membukakan hasil. Bukan sekedar mempertahankan subsidi, Fraksi PKS juga berhasil mendesak Pemerintah menambah kuota subsidi gas dari 7 juta ke 7.5 - 7.8 juta metrik ton.

Dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM terkait penetapan asumsi makro RAPBN 2021, Senin (29/06/2020) Fraksi PKS minta dengan tegas Pemerintah tidak mengurangi anggaran subsidi untuk rakyat, terutama subsidi gas, listrik dan BBM. Bahkan jika perlu subsidi ditambah sebagai wujud kepedulian negara terhadap kesulitan masyarakat akibat pandemi Covid 19.

Fraksi PKS menilai saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang melemah dan perlu ada stimulus dari Pemerintah agar kegiatan ekonomi dapat berjalan.

Stimulus atau rangsangan itu perlu disalurkan dalam bentuk penyediaan barang kebutuhan pokok seperti gas, listrik dan BBM dengan harga terjangkau. Diharapkan, dengan harga gas, listrik dan BBM yang terjangkau tersebut masyarakat dapat lebih mudah memulai usaha masing-masing. Untuk itulah Pemerintah perlu menyediakan subsidi yang memadai.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyebutkan, usulan agar Pemerintah mempertahankan subsidi, bahkan jika perlu

menambahnya, dibuat berdasarkan masukan dari masyarakat, hasil kajian komprehensif dan juga pertimbangan lain yang objektif.

Fraksi PKS menilai postur anggaran RAPBN 2021 harus diarahkan untuk kepentingan rakyat kecil, bukan hanya untuk kepentingan kelompok pengusaha besar.

"Alhamdulillah yang diperjuangkan Fraksi PKS terkait penambahan subsidi gas dan listrik diterima dan disetujui menjadi keputusan bersama antara DPR dan Pemerintah," ungkapnya.

Hasil rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, lanjut Mulyanto, memutuskan subsidi gas ditambah, subsidi listrik sebesar Rp 54 triliun dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai tukar dolar.

"Fraksi PKS akan terus mengawal keputusan tersebut hingga tingkat pembahasan paling akhir. Kami sangat yakin keputusan tersebut akan diterima dan disetujui karena terkait kepentingan rakyat banyak," tandas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan ini.



# Perlu Langkah Ekspansif Fiskal dan Atraktif untuk Optimalisasi Pendapatan Negara.

Dengan melihat pemulihan ekonomi yang agak lambat pada tahun 2020, juga penetapan Asumsi Makro Ekonomi seperti Proyeksi Harga ICP (Indonesian Crude Price) dan masih perlunya Subsidi Ketahanan Energi membuat agak berat untuk mengangkat penerimaan pada tahun 2021.

## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Rofik Hananto dalam Rapat Panja Asumsi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Selasa, 30 Juni 2020 mensoroti target Tax Ratio yang ditargetkan hanya 8,57% pada tahun 2020. Target Tax Ratio yang turun ini tentu berpengaruh terhadap target penerimaan negara tahun 2020.

Dampaknya defisit anggaran masih akan terus membesar pada tahun 2021. Dengan melihat pemulihan ekonomi yang agak lambat pada tahun 2020, juga penetapan Asumsi Makro Ekonomi seperti Proyeksi Harga

ICP (Indonesian Crude Price) dan masih perlunya Subsidi Ketahanan Energi membuat agak berat untuk mengangkat penerimaan pada tahun 2021. Defisit masih akan lebar pada tahun 2021 seperti ini tidak bisa dielakkan dan perlu diwaspadai.

FPKS melalui Rofik Hananto di Panja Asumsi Banggar, meminta penjelasan yang lebih detail dan lengkap terkait bagaimana langkah Pemerintah dalam melakukan fiskal ekspansif, membuat terobosan optimalisasi pendapatan, langkah-langkah

spending better yang lebih detail seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan di forum Banggar DPR RI danantisipasi pengendalian dan mitigasi risiko utang.





## Serapan Anggaran Kemenag Minim

# Iskan: Bantu Tokoh Agama dan Perbaiki Tempat Ibadah

"Ini sudah akhir bulan juni, sementara serapan di Kementerian Agama RI masih minim (baru hanya 38%), Saya ingin Menteri Agama bisa memanfaatkan kondisi musibah seperti ini, untuk dapat menggunakan anggaran lebih tepat sasaran, segera lakukan realokasi anggaran tahun 2020

### H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (26/06) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, menanggapi terkait dengan minimnya penyerapan anggaran Kementerian Agama dalam rapat kerja bersama Menteri Agama RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, (25/6/2020). Iskan Qolba Lubis menyadari bahwa anggaran Kemenag yang termasuk besar ini, harus bisa terserap secara maksimal dimasa pandemi ini. "Bantu guru-guru ngaji, para ustadz kampung dan tingkatkan sarana dan prasarana ibadah serta pendidikan

keagamaan yang terdampak covid 19" ujarnya

Di tahun 2019 saja, lanjut Iskan, realisasi anggaran kementerian Agama RI pada APBN sebesar Rp 63,946 Triliun atau 96,28 % dari total anggaran Rp 66,418 Triliun.

Sementara itu, per (24/6/2020) serapan anggaran di Kementerian Agama RI baru mencapai Rp 24,722 Triliun atau 38,69 % dari total pagu anggaran Rp 63,892 Triliun.

"Ini sudah akhir bulan juni, sementara serapan di Kementerian Agama RI masih minim (baru hanya 38%),

Saya ingin Menteri Agama bisa memanfaatkan kondisi musibah seperti ini, untuk dapat menggunakan anggaran lebih tepat sasaran, segera lakukan realokasi anggaran tahun 2020. Misal bisa membantu para guru ngaji dan ustadz kampung, serta bisa membangun sarana prasarana tempat ibadah di tempat-tempat yang terdampak covid 19," papar Iskan.

Di lain sisi, Iskan menilai dan membandingkan dengan Kementerian Sosial yang meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat pandemi virus corona.

Sementara, imbuhnya, Kemenag tak memiliki program serupa untuk memberikan bantuan kepada para ustadz dan guru-guru ngaji.

"Mereka (guru-guru ngaji dan para ustadz) butuh diperhatikan, sebagian diantara mereka penghasilan utamanya dari profesi seperti itu. Maka banyak kita lihat saat ini mereka beralih profesi sementara, ada yang berjualan, jadi tukang parkir bahkan jadi

buruh serabutan. Selama covid 19 ini, banyak yang menghentikan aktifitas mengajarnya.

Kegiatan di masjid-masjid juga ditutup. Biasa dibulan Ramadhan tahun sebelumnya, mereka bisa aktif menjalankan profesinya. Tapi saat ini, berbantuan 180 derajat, perekonomian keluarganya pasti memburuk. Lebih kurang 4 bulan ini mereka terpapar situasi corona, banyak diantara mereka tanpa penghasilan. Apakah menteri agama tidak memikirkan hal ini?" tanya Iskan.

Untuk itu, legislator PKS ini mendesak agar Menteri Agama dan jajarannya agar segera

melakukan realokasi anggaran tahun 2020 dalam percepatan penanganan dampak Covid-19.

"Seperti peningkatan tunjangan Profesi Guru, inpassing (penyesuaian PNS), pemberian bantuan penanggulangan dampak wabah Covid-19 untuk para guru ngaji dan ustadz kampung serta tenaga pendidikan keagamaan, peningkatan sarana-prasarana madrasah, pesantren, pendidikan keagamaan, tempat ibadah, dan PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri)," pungkas Iskan mengakhiri.





**Raker DPR dengan Menteri Agama**

# Bukhori Minta Kemenag Bantu Madrasah Swasta

“Saya meminta, khususnya bagi para penyuluh agama non PNS perlu ada biaya pembinaan. Jika tidak ada, lalu bagaimana, Pak? Padahal, mereka ini adalah cara Bapak untuk sampai kepada masyarakat

**KH. BUKHORI, Lc., M.A.***Anggota Komisi VIII DPR RI*

Jakarta (27/06) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Kementerian Agama memberikan perhatian serius kepada madrasah atau sekolah swasta dari tingkat dasar sampai tingkat menengah.

Bukhori berharap agar Kementerian Agama memberikan bantuan secara nyata dan penuh kepada instansi pendidikan tersebut melalui sumber anggaran yang tersedia.

“Kami mohon komitmen Pak Menteri, yakni memperhatikan serta meng-endorse secara nyata dengan anggaran untuk membantu sekolah-sekolah swasta. Semisalnya diperkenankan, saya ingin sumber anggar-

an dari Surat Berutang Syariah Negara (SBSN) yang senilai Rp 3,3 Triliun tersebut, seluruhnya, 100% untuk bantu sekolah swasta. Jika kemudian ada hal-hal yang perlu diubah, saya kira perlu” ungkap Bukhori dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama di Gedung DPR, Jumat (26/06/2020).

Bukhori menambahkan, selama ini Kementerian Agama dinilai tidak memiliki perhatian serius kepada sekolah-sekolah tersebut sehingga mengganggu suasana batin sebagian anggota Komisi VIII DPR RI yang prihatin terhadap kondisi keterbatasan sarana dan prasarana sekolah swasta yang berada di bawah naungan Kemenag.

“Ini suasana batin kami, Pak. Sebab, kami melihat Kementerian Agama benar-benar tidak ada perhatian pada hal tersebut. Karena itu perlu segera diberikan perhatian” sambungnya.

Berdasarkan sumber dana, Anggaran Pagu Indikatif Kementerian Agama TA 2021 salah satunya berasal dari SBSN. Dari 6 komponen sumber anggaran yang dipaparkan, anggaran yang bersumber dari SB SN senilai Rp 3.341.281, 27,- atau kurang lebih Rp 3,3 Triliun.

Masih terkait isu pendidikan, politisi PKS ini juga menyoroti polemik uang kuliah tunggal (UKT) yang banyak dikeluhkan oleh mahasiswa selama masa pandemi.

Bukhori meminta agar biaya UKT, khususnya bagi Perguruan Tinggi di bawah naungan Kemenag, bisa disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pembelajaran dan pendidikan di perguruan tinggi selama masa pandemi.

Menurutnya, biaya kuliah perlu diturunkan mengingat para peserta didik tidak menggu-



nakan fasilitas dan sarana kampus secara penuh, apalagi terdapat sebagian besar orang tua peserta didik yang turut terdampak akibat pandemi.

“Terkait UKT, kita mengetahui bahwa sampai akhir 2020 ini, dipastikan perkuliahan dilakukan secara online. Artinya, pembiayaan operasional seperti maintenance kelas, listrik, dan biaya operasional lain akan berkurang semua. Secara konsekuensi logis, pengurangan biaya operasional kampus ini seharusnya berimbas kepada mahasiswa, khususnya dalam hal kewajiban membayar UKT. Apalagi, banyak di antara mereka memiliki orang tua yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19. Oleh karena

itu, UKT harus dikurangi” paparnya.

Selain menyoroti isu pendidikan, Bukhori juga meminta agar biaya pembinaan bagi penyuluh agama non PNS dari tingkat desa sampai kecamatan perlu dianggarkan.

Bukhori menganggap para penyuluh agama memiliki fungsi strategis, yakni sebagai ujung tombak sosialisasi kebijakan Kementerian Agama, misalnya dalam hal penerangan protokol kesehatan sampai upaya menangkal radikalisme di tingkat akar rumput. Kendati harus memikul tanggung jawab besar tersebut, nasib mereka sangat memprihatinkan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Iuran BPJS Resmi Naik

# Mufida Ingatkan Gelombang Tunggakan dan Turun Kelas

Fraksi PKS DPR RI sudah menyampaikan sikap penolakan dalam berbagai forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dan juga di Paripurna DPR RI. Hasil dua kali RDP Komisi IX dengan BPJS Kesehatan dan jajaran tidak diindahkan. Padahal waktu itu BPJS Kesehatan dan jajaran sepakat akan melaksanakan putusan MA untuk tidak menaikkan iuran BPJS

### Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (05/07) — Pemerintah resmi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menegaskan Fraksi PKS sudah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku 1 Januari 2020.

Fraksi PKS kembali menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang resmi naik 1 Juli 2020 setelah sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung.

Mufida menyebut Fraksi PKS DPR RI sudah menyampaikan sikap penolakan dalam berbagai forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dan juga di Paripurna DPR RI.

"Hasil dua kali RDP Komisi IX dengan BPJS Kesehatan dan jajaran tidak diindahkan. Padahal waktu itu BPJS Kesehatan dan jajaran sepakat akan melaksanakan putusan MA untuk tidak menaikkan iuran

BPJS," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (05/07/2020).

Mufida menyebut Fraksi PKS juga secara resmi mengirim surat kepada pemerintah agar membatalkan kenaikan iuran BPJS. Alasan utama penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan di tengah-tengah kondisi sulit ekonomi masyarakat.

"Kesepakatan dengan DPR RI tidak diindahkan dan berbagai alasan untuk lebih berempati terhadap kesulitan masyarakat juga tidak didengar. Salah tata kelola kemudian mengorbankan masyarakat yang sedang sulit ekonominya," ungkap Mufida yang mewakili Daerah Pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri.

Mufida memprediksi, akan terjadi penurunan kelas secara massif dari peserta mandiri. Selain itu potensi penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga bisa meningkat tajam.

"Akan terjadi gelombang turun kelas karena kondisi ekonomi saat ini sulit. Pada



awal tahun depan subsidi untuk peserta kelas III juga akan berkurang. Ada potensi penunggakan pembayaran yang justru akan mengganggu kinerja BPJS Kesehatan," kata dia.

Jika terjadi tunggakan yang massif, pemerintah akan kembali terjebak pada lingkaran setan kebijakan dengan mengancam warga tidak mendapatkan layanan publik.

"Kalau kembali seperti itu polanya, artinya tidak ada inovasi dalam penyelamatan manajemen keuangan BPJS Kesehatan. Jika warga diancam jika menunggak iuran maka dua kali pemerintah menzalimi rakyat. Kembali menaikkan iuran dan memberi ancaman saat warga tidak mampu membayar," terang dia.

Presiden Marahi Menteri saat Evaluasi Penanganan Covid-19,

# Netty: Kenapa Baru Sekarang?

Kenapa Presiden baru jengkel sekarang ?  
sejak lama saya sudah sampaikan bahwa  
Presiden harusnya turun langsung memim-  
pin orkestrasi penanganan Covid-19,

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (29/6) — Presiden Joko Widodo marah pada para menteri dan pimpinan lembaga negara karena tidak maksimal bekerja di saat pandemi Covid-19.

Kegiatan itu terjadi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada (18/06/2020) lalu, tetapi rekaman video sidang baru dipublikasikan dalam akun Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu, (28/06/2020).

Salah satu Kementerian yang disoroti Presiden Jokowi ialah Kementerian Kesehatan yang dianggap serapan anggarannya rendah, baru 1,53 persen dari total 75 T.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Aher menilai kemarahan Presiden ini sangat terlambat.

"Kenapa Presiden baru jengkel sekarang ? sejak lama saya sudah sampaikan bahwa Presiden harusnya turun

langsung memimpin orkestrasi penanganan Covid-19," kata Netty dalam keterangan medianya, Senin (29/06).

Menurut Netty, ada banyak persoalan di lapangan yang harus diselesaikan menggunakan leadership power presiden.

"Saat ini masyarakat menyaksikan bahwa penanganan pandemi sangat lambat, tidak terkoordinasi dengan baik, cenderung sektoral dan birokratis. Bukan hanya soal serapan anggaran, tapi juga soal data, distribusi bansos dan pola komunikasi yang gaduh," terang Netty.

Selain itu, Netty juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mewacanakan ekspor APD di tengah belum layaknya APD untuk nakes Indonesia.

"Banyak keluhan dari tenaga medis di lapangan, bahwa APD untuk mereka belum layak dan belum

tercukupi tapi pemerintah malah mewacanakan untuk mengekspor APD. Ini kan aneh dan tidak nyambung," katanya.

"Jadi, jika hampir semua Kementerian dan lembaga dianggap masih berkinerja kurang atau tidak ada progress, maka harus dicari akar masalahnya, lalu diselesaikan hingga tuntas. Menurut saya ini adalah tanggung jawab Presiden sebagai pemegang mandat pemerintahan tertinggi yang harus memberikan arahan, mengontrol dan mengevaluasi secara ketat sejak awal. Presiden harus tegas dan siap pasang badan untuk melindungi rakyatnya," ujar Netty.

Jika kemudian ada wacana reshuffle, kata Netty Aher, itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi dan mengontrol para pembantunya, termasuk Menkes, sepanjang ada ukuran kinerja yang fair dan transparan.

"Jika merujuk pada penyerapan anggaran Kemenkes yang rendah, tentu Presiden harus mengevaluasi juga kinerja Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 secara menyeluruh, bukan hanya Menkes mengingat serapan yang rendah ini terkait dengan penanganan Covid-19," tutup Netty



## Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Akan Dibuka

# Sakinah: Penyuluh Protokol Kesehatan Diperlukan

Penyuluh ini penting sekali, karena ternyata masih banyak masyarakat yang tidak memahami protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19. Pada masa transisi new normal, kami berharap agar pelaku usaha menjalankan protokol kesehatan sesuai yang telah ditentukan oleh pihak terkait

**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**

Anggota Komisi X DPR RI

Palu (26/06) — Ditengah pandemi Covid-19, para pelaku UMKM dan pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah Covid-19 secara ekonomi.

Sektor ini tidak mampu lagi menjadi penyangga perekonomian negara seperti saat krisis ekonomi dan keuangan tahun 1998 silam.

Pendapatan dari sektor ini bukan hanya turun drastis, namun nyaris lumpuh. Akibatnya banyak pelaku usaha yang gulung tikar dan merumahkan karyawannya.

Menanggapi akan dibuka-

nya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saat masa transisi new normal, Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri mengatakan perlunya penyuluh untuk menerapkan protokol kesehatan di setiap sudut destinasi pariwisata dan UMKM.

“Diperlukan penyuluh protokol kesehatan dimasa new normal yang ditempatkan di sudut-sudut kegiatan pariwisata dan kegiatan usaha,” tutur Sakinah disela-sela rapat dengar pendapat dengan pelaku UMKM secara virtual, Kamis, (25/06/2020).

Penyuluh ini penting

sekali, karena ternyata masih banyak masyarakat yang tidak memahami protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19.

“Pada masa transisi new normal, kami berharap agar pelaku usaha menjalankan protokol kesehatan sesuai yang telah ditentukan oleh pihak terkait,” ungkapnya.

Selain penerapan protokol kesehatan secara benar, pengawasannya pun harus ketat. Agar destinasi pariwisata serta tempat-tempat UMKM tidak menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

“Selain penyuluh, juga harus ditempatkan satpol PP untuk patroli penerapan protokol kesehatan,” terangnya.

Dalam praktiknya, pihak-pihak terkait harus memperketat penerapan protokol kesehatan. Pengelola destinasi pariwisata dan tempat-tempat UMKM di sekitar pariwisata harus selalu mengingatkan pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan melalui pusat informasi minimal setiap 15 menit sekali.



**PPDB Masih Polemik**

# Fikri Minta Kemendikbud Sederhanakan Regulasi

"Kebijakan zonasi oleh pusat sejak diterapkan 2017 hingga sekarang masih menyisakan problem, saya kira karena setiap daerah punya karakteristik yang unik, inilah mengapa perlu ada keleluasaan bagi daerah untuk menentukan sendiri sistem yang pas, misalnya soal PPDB

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Semarang (26/06) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyederhanakan regulasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang masih menyisakan polemik di beberapa wilayah.

"Saat ini era desentralisasi dan otonomi pendidikan ke daerah, sebaiknya regulasi pusat hanya mengatur umum, detailnya serahkan ke dinas pendidikan," kata Fikri di Semarang, Kamis (25/6).

Fikri menyoroti masih

banyaknya pengaduan soal problematika penerapan PPDB di berbagai wilayah.

"Kebijakan zonasi oleh pusat sejak diterapkan 2017 hingga sekarang masih menyisakan problem, saya kira karena setiap daerah punya karakteristik yang unik, inilah mengapa perlu ada keleluasaan bagi daerah untuk menentukan sendiri sistem yang pas, misalnya soal PPDB," imbuh politisi PKS ini.

Zonasi yang dipaksakan, kata Fikri malah berimbas pada kesejahteraan jumlah murid,

bukan pemerataan.

"Contoh kasus di dapil saya di Kota Tegal, ada satu kecamatan Tegal Selatan yang tidak ada SMA dan SMK, orangtua murid jadi stres mau sekolah dimana anaknya," katanya.

Sementara itu, yang sedang hangat soal kuota umur yang menjadi syarat dalam kuota zonasi PPDB di DKI Jakarta.

"Dasarnya tetap kebijakan Permendikbud nomor 44/2019 tentang PPDB," jelas Fikri.

Dia menerangkan, dalam Permendikbud 44/2019 pasal 24 ayat (1) disebutkan seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan orangtua/wali calon peserta didik kelas 1 SD mempertimbangkan kriteria dengan prioritas: a. usia sebagaimana pasal 7 ayat (1), dan b. jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah dalam wilayah zonasi.

Sedangkan pasal 25 yang menerangkan syarat kuota zonasi bagi siswa kelas 7 (SMP) dan 10 (SMA), ayat (2)nya berbunyi: Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama,



maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Sementara di Jawa Tengah, marak isu kecurangan dalam pelaksanaan PPDB, misalnya soal manipulasi data surat domisili demi memenuhi syarat kuota zonasi.

"Di Kota Semarang misalnya, ditemukan dugaan pemalsuan nilai rapor dan piagam penghargaan sebagai syarat kuota jalur prestasi. Selain itu, di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terdapat beberapa kelurahan yang tidak masuk zona manapun dalam PPDB. Ini

menyulitkan," ungkap Fikri.

"PPDB dengan sistem daring selama pandemi juga mempersulit verifikasi dibanding dengan verifikasi dokumen fisik," tambah Fikri.

Terkait regulasi, Fikri menilai panduan PPDB dalam Permendikbud 44/2019 masih terlalu rigid dalam menentukan penerimaan siswa di sekolah negeri.

"Sedangkan kebijakan Pendidikan dasar dan menengah, sesuai UU otonomi daerah sudah diserahkan kepada Dinas Pendidikan di daerah, yakni SD-SMP di kabupaten/ kota dan SMA/K di Provinsi," urainya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Legislator PKS Ingatkan Tiga Kelompok yang Tertinggal dari Peta Jalan Pendidikan

Lebih dari 30% guru yang mengabdikan dalam dunia pendidikan Indonesia adalah guru Non ASN, yang kita lebih kenal sebagai guru honorer. Sebagian besar dari mereka mengabdikan di pedesaan termasuk yang berada di wilayah 3T dengan segala kesulitannya.

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (03/07) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan Menteri Pendidikan pada tiga kelompok yang tertinggal dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia, dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (02/07/2020) lalu.

Ledia menyebutkan ketiganya adalah orangtua, siswa penyandang disabilitas dan guru honorer.

“Di saat kita sama-sama membahas soal merdeka belajar, keluarga seringkali dikata-

kan sebagai salah satu subjek penting dalam perkembangan pendidikan bagi siswa didik yang bahkan peran pentingnya tidak bisa disubstitusi oleh guru maupun sekolah tetapi justru di dalam peta jalan ini belum kelihatan di mana letak penguatan peran orangtua, juga bagaimana pola komunikasi antara pengelola penyelenggara pendidikan, guru, pemerintah dengan orangtua,” jelas Ledia

Apalagi, lanjut Ledia, di dalam kondisi pandemi yang telah memaksa siswa untuk melakukan pembelajaran jarak

jauh, peran orangtua menjadi sangat krusial untuk mendampingi anak belajar. Sementara tidak semua orangtua siap dan mampu menjadi mentor pembelajaran yang baik bagi anak terutama untuk persoalan pembelajaran yang bersifat kognitif.

“Secara umum orangtua jelas bertanggung jawab dalam pendidikan anak, terutama dalam proses tumbuh kembang aspek afektif siswa. Namun di saat kita kini juga melibatkan orangtua juga untuk bertanggung jawab terkait pendidikan sekolah anaknya tentu kita pun harus membuka satu bagian dari peta jalan ini terkait bagaimana membangun ketahanan keluarga agar si anak bisa merasakan keterlibatan orangtua pada pendidikan anak dan orangtua tidak menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan pada sekolah,” sambung Aleg Fraksi PKS ini lagi.

Hal kedua yang diamati Ledia adalah terkait para siswa penyandang disabilitas. Di mana menurutnya dari peta



jalan yang diajukan pihak kemendikbud belum nampak mengakomodir atau menempatkan secara khusus bagaimana rencana penanganan bagi para siswa penyandang disabilitas.

“Afirmasi bagi peserta didik penyandang disabilitas tidak nampak dalam peta jalan ini, apa rencana dan program bagi mereka serta bagaimana pola koordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab, secara jumlah, kebanyakan peserta didik penyandang disabilitas berada di level sekolah dasar dan menengah baik di sekolah inklusi ataupun SLB yang secara teknis

administratif berada di bawah kewenangan daerah,” kritisinya.

Kelompok ketiga yang diamati Ledia masih tertinggal dalam peta jalan adalah para guru Non ASN atau yang lebih umum dikenal sebagai guru honorer.

Sekretaris Fraksi PKS ini melihat bahwa upaya penyelesaian solusi atas nasib mereka belum nampak di dalam peta jalan ini. Padahal jumlah guru honorer di Indonesia tidak sedikit, hampir mencapai angka 1 juta guru.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

## Berkurangnya Penerimaan Pajak Terulang Setiap Tahun

# Anis Minta Menkeu Lakukan Evaluasi Serius

Bagaimana Kementerian Keuangan membimbing, mengarahkan, memaksimalkan, kinerja otoritas perpajakan agar kinerja otoritas perpajakan jadi semakin baik? Dan bagaimana juga evaluasinya?"

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (25/06) — Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyototi laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2019 yang menyebutkan bahwa terdapat kenaikan jumlah putusan pengadilan pajak atas banding dan gugatan yaitu dari 6034 menjadi 6763 dalam satu tahun.

Hal tersebut disampaikan Anis dalam Raker dengan Menkeu & Menteri PPN/Ka Bappenas, yang membahas Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Pada RAPBN 2021, Selasa (23/06/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Anis juga mengkritisi

sisi lain yaitu tingkat kemenangan DJP atas peradilan perpajakan sepanjang 2019 yang menurun dari 43,5% menjadi hanya 40,4%. Jumlah putusan pengadilannya naik tetapi tingkat kemenangannya menurun.

"Bagaimana Kementerian Keuangan membimbing, mengarahkan, memaksimalkan, kinerja otoritas perpajakan agar kinerja otoritas perpajakan jadi semakin baik? Dan bagaimana juga evaluasinya?" tanya Anis.

Anis menegaskan bahwa evaluasi ini sangat penting untuk memacu kinerja otoritas

pajak agar target-target yang dicanangkan dapat sasaran optimal, sehingga meminimalisir shortfall perpajakan setiap tahun.

"Karena faktanya shortfall perpajakan selalu terjadi setiap tahun" ungkapnya.

Politisi dari Fraksi PKS ini juga mengemukakan temuan-temuan BPK atas pengelolaan utang tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan. BPK telah memberikan catatan terkait belum adanya pembagian tugas wewenang antar instansi pemerintah tentang pengembangan pasar surat utang negara dan surat berharga syariah negara, pengelolaan DPPN, program BPI, dan risk pro oleh BLU LPDP tahun 2017 sampai 2021 pada tahun 2019 yang dinilai kurang efektif.

"Bagaimana dan langkah apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi BPK RI tersebut?" ujarnya.

Anis menekankan



kepentingan menindakkan temuan BPK tersebut untuk meminimalisir permasalahan pengelolaan anggaran negara yang tidak efektif dan efisien. "Agar di masa mendatang, APBN kita semakin kredibel," tuturnya.

Secara khusus, Anis juga menyototi Program Dukungan Manajemen di Kemenkeu dengan alokasi anggaran sebesar 40 triliun lebih atau sebesar 94,6% dari total pagu indikatif yang jumlahnya 42 Triliun.

Dalam pemaparannya, Menkeu menjelaskan bahwa anggaran program dukungan

manajemen ini mencakup seluruh unit eselon I dengan seluruh kegiatan yang ada didalamnya.

"Bagaimana logika berpikirnya, ketika dari 5 program yang ada, satu program yaitu dukungan manajemen yang mencakup seluruh unit Eselon I menggunakan anggaran 94,6% dari total anggaran pagu indikatif?" tanya Anis.

Menurut Anis, dengan proporsi alokasi yang sedemikian besar, seharusnya diberikan penjelasan kerangka pikir yang lebih detail.

# Redesain Anggaran Harus Diikuti Peningkatan Kontribusi Belanja Pemerintah

“Diharapkan jangan hanya matang dikonsep, tetapi melempem dalam implementasinya. Program tersebut harus juga diimplementasikan dalam tataran ekonomi daerah, Kami berharap, redesign anggaran tersebut dapat meningkatkan kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama ini, kontribusi belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 10 persen”,

**Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (25/06) — Langkah pemerintah meredesain anggaran pada 2021 semestinya dapat memperbaiki rencana dan realisasi anggaran ke depan. Berdasar hasil kajian pemerintah diketahui bahwa selama ini K/L terlalu banyak program dan kurang sinergi, situasi yang demikian menyebabkan banyaknya program yang tumpang tindih.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly mengatakan bahwa dari informasi yang diterima, sudah ada pengerucutan program dari 428 menjadi 102 program. "Rinciannya adalah

satu program generik, 17 program lintas K/L, 84 program teknis spesifik K/L", imbuh Junaidi.

Junaidi melanjutkan, jumlah program yang sangat besar menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya program-program tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan K/L kurang fokus terhadap program apa yang akan disasar.

Aleg Komisi XI DPR ini menambahkan bahwa konsep money follows program yang menjadi satu kesatuan dalam redesign anggaran.

"Diharapkan jangan hanya

matang dikonsep, tetapi melempem dalam implementasinya. Program tersebut harus juga diimplementasikan dalam tataran ekonomi daerah," tandasnya.

"Kami berharap, redesign anggaran tersebut dapat meningkatkan kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama ini, kontribusi belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 10 persen", imbuh Junaidi mengakhiri.



# Gelontoran Uang Negara 30 Triliun Kepada Perbankan Dipertanyakan

"Ditengah keterbatasan anggaran negara dan ancaman defisit, ini justru berpotensi mempersulit pemerintah sendiri, dana Rp30 triliun bukan nilai yang kecil, pemerintah harus cermat dan kredibel

## H. HIDAYATULLAH, S.E

Anggota Komisi XI DPR RI

Medan (30/06)—  
Sesungguhnya ekonomi Indonesia menjadi sempurna jatuh pada titik nadir dengan hadirnya pandemi covid-19 yang menghantam sekaligus sisi permintaan dan penawaran.

Oleh karena itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah, mempertanyakan keputusan pemerintah saat mengelontorkan uang negara sebanyak Rp 30 triliun untuk bank-bank plat merah.

"Tanpa pemerintah dorong daya beli dahulu secara extraordinary, dalam situasi permintaan turun dan ekonomi melambat, bank tersebut akan

melonjak risiko kreditnya", kata Hidayatullah, (29/06/2020).

Menurut Hidayatullah penurunan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 menjadikan naiknya nilai kredit menganggur bank atau undisbursed loan.

Berdasar data OJK undisbursed loan per Maret 2020 meningkat angkanya hingga 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pemerintah harusnya cermat, penyaluran kredit saat ini tidak mudah

Menurut legislator PKS ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70 tahun 2020 dalam pertimbangannya menyebutkan

penempatan dana ini untuk disalurkan sebagai kredit pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta koperasi.

"Tapi masalahnya adalah 70 persen dari 60 juta unit UMKM di Indonesia belum punya akses pembiayaan dari perbankan, PR itu yang harus diselesaikan dulu," kata Hidayatullah.

Anggota DPR RI asal medan ini menyatakan akan terus memperhatikan dan mengikuti perkembangan program pemerintah ini untuk menghindari dugaan hidden agenda akan mengalirnya penyaluran kredit ini kepada konglomerasi yang sedang bermasalah.

"Ditengah keterbatasan anggaran negara dan ancaman defisit, ini justru berpotensi mempersulit pemerintah sendiri, dana Rp30 triliun bukan nilai yang kecil, pemerintah harus cermat dan kredibel" ujar Hidayatullah.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# Gelontoran 30 T Kepada Perbankan Dipertanyakan



Tanpa pemerintah dorong daya beli dahulu secara extraordinary, dalam situasi permintaan turun dan ekonomi melambat, bank tersebut akan melonjak risiko kreditnya. penurunan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19 menjadikan naiknya nilai kredit menganggur bank atau undisbursed loan.



**H. Hidayatullah, S.E.**  
Anggota Komisi XI DPR RI



## Beri Ruang Aturan terkait Keluarga dan Kolaborasi Ilmu

# Fraksi PKS Apresiasi RUU Profesi Psikologi

menjaga atau memperbaiki kondisi keluarga melalui konseling, pelatihan dan berbagai cara lainnya merupakan suatu hal yang penting untuk diberi payung hukum.

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Anggota Baleg DPR RI

Jakarta (01/07) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengatakan pihaknya mengapresiasi masuknya aturan terkait dengan keluarga sebagai bidang yang diatur dan diberi payung hukum dalam RUU tentang Praktik Psikologi.

"Kami menyambut baik, mengapresiasi dan menyetujui aturan terkait dengan keluarga sebagai bidang yang diatur dan diberi payung hukum dalam RUU ini," katanya di Gedung Parlemen, (29/06/2020).

Anis yang saat itu membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap RUU Tentang Profesi Psikologi yang telah dibahas dan diharmonisasi oleh panitia Baleg selama lebih dari 3 bulan, menegaskan pentingnya

negara memberikan perhatian yang serius terhadap keluarga yang merupakan lingkungan inti yang akan membentuk karakter masyarakat.

"Lahirnya SDM unggul yang sehat jiwa raga, yang akan membangun negeri dan membawa kemajuan bangsa, dimulai di keluarga," tegasnya.

Oleh karena itu, menurut Anis menjaga atau memperbaiki kondisi keluarga melalui konseling, pelatihan dan berbagai cara lainnya merupakan suatu hal yang penting untuk diberi payung hukum. Keberadaan payung hukum ini akan menunjukkan perhatian serta keseriusan negara dalam memperbaiki kondisi keluarga-keluarga yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat

yang sehat secara kejiwaan.

Dalam penjelasannya, Anis mengungkapkan bahwa situasi pandemik yang dihadapi masyarakat dunia pada hari ini, berdampak pada Kesehatan mental masyarakat.

"Tidak sedikit masyarakat yang mengalami gangguan mental karena menghadapi berbagai tekanan sebagai dampak pandemik," ungkapnya.

Sejumlah peneliti di Lancet Psychiatry mengimbau agar penelitian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental dapat diprioritaskan. Emily Holmes dari Departemen Psikologi Universitas Uppsala menyatakan peningkatan gejala stres dan cemas selama situasi pandemik telah diprediksi para ahli, tetapi adanya resiko jumlah orang yang mengidap anxiety, depresi, dan melakukan tindakan berbahaya seperti menyakiti diri sendiri meningkat signifikan.

"Dalam situasi seperti ini, kehadiran para psikolog sangat dibutuhkan dan profesi mereka perlu dilindungi hukum," ujar Anis.



Anis juga menyampaikan PKS mengapresiasi keterbukaan terhadap kolaborasi ilmu yang ditunjukkan dalam RUU ini, yang juga sejalan dengan kode etik psikologi itu sendiri.

Penjelasan tentang praktisi psikologi yang secara eksplisit menyatakan tidak harus linier secara pendidikan, lanjutnya, cukup dengan menempuh salah satu jenjang pendidikan psikologi, telah

membuka kemungkinan kolaborasi ilmu yang memungkinkan munculnya bidang ilmu atau bidang pekerjaan baru dimasa mendatang yang mungkin tidak cukup diatasi oleh bidang ilmu yang ada sekarang.

"Perkembangan ilmu pengetahuan menjadikan kolaborasi ini suatu keniscayaan yang tidak bisa dicegah," tutupnya.

Raker dengan MenKum HAM,

# Fraksi PKS Mendesak Respon Pemerintah Atas Penolakan RUU HIP

“Sebagaimana aspirasi yang kami terima saat itu adalah agar Pemerintah tidak menunda, tetapi menolak, men-drop dari prolegnas. Sebagaimana kami pahami terkait mekanisme dalam UU MD3 bahwa RUU ini posisinya saat ini ada di Pemerintah, karenanya kami hendak meneruskan amanat dari masyarakat luas”

**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (02/07) — Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan jawaban terkait penolakan publik terhadap RUU HIP.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda membahas Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 antara Pemerintah dan DPR di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (2/7).

“Kami dari Fraksi PKS ingin mendengar penjelasan dari Pak Menteri yang mewakili Presiden, apakah Presiden

sudah membuat surpres bersifat menolak terhadap RUU HIP atau hanya sekedar menunda” ujar politisi PKS ini.

Desakan tersebut disampaikan dalam rangka meneruskan aspirasi yang diterima oleh Fraksi PKS ketika menerima perwakilan demonstran saat terjadi unjuk rasa penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR pada 24 Juni silam.

Dalam kesempatan tersebut, Bukhori juga mengingatkan bahwa posisi RUU tersebut saat ini ada di tangan Pemerintah.

“Sebagaimana aspirasi

yang kami terima saat itu adalah agar Pemerintah tidak menunda, tetapi menolak, men-drop dari prolegnas.

Sebagaimana kami pahami terkait mekanisme dalam UU MD3 bahwa RUU ini posisinya saat ini ada di Pemerintah, karenanya kami hendak meneruskan amanat dari masyarakat luas” jelasnya.

Di hadapan Menteri Hukum dan HAM, Anggota Komisi VIII DPR ini mengungkapkan bahwa tidak hanya ormas Islam yang menolak RUU HIP tetapi juga dari kalangan TNI, Polri, dan sejumlah pihak lain yang keberatan terhadap RUU ini.

Oleh sebab itu, Bukhori mendesak agar Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah agar segera memberi kepastian.

“Penolakan ini tidak hanya datang dari ormas Islam tetapi juga dari kalangan TNI, Polri, dan seterusnya. Maka kami ingin mendengar dari Pemerintah melalui Pak Menteri apakah Presiden berkenan untuk menolak atau ini masih menjadi teka-teki” ungkapnya



# Legislator PKS Setuju Lahirnya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)

“Ada jutaan WNI yang menjadi PRT baik di dalam negeri maupun di berbagai negara, namun mereka belum memiliki instrumen hukum yang bisa melindungi mereka sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pekerja sektor formal lainnya,” tegas Amin.

## AMIN AK, M.M.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (01/07) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menyetujui Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pandangan mini Fraksi PKS yang dibacakan oleh juru bicara Fraksi PKS, Amin Ak dalam Rapat Pengambilan Keputusan penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang digelar Badan Legislasi DPR RI, di Gedung DPR RI, Rabu (01/07).

Dalam pandangannya, Anggota Fraksi PKS tersebut

menyampaikan, perlindungan PRT merupakan bagian tidak terpisahkan dari perlindungan oleh negara terhadap warga negaranya yaitu memberikan perlindungan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tiap warga negara.

Fraksi PKS memandang hadirnya UU yang mengatur tentang perlindungan terhadap PRT merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warganya.

“Ada jutaan WNI yang menjadi PRT baik di dalam negeri maupun di berbagai negara, namun mereka belum memiliki instrumen hukum yang bisa melindungi mereka sebagai-

mana perlindungan yang diberikan kepada pekerja sektor formal lainnya,” tegas Amin.

erkait pembahasan RUU Perlindungan PRT, lanjut Amin, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan. Pertama, FPKS mengapresiasi hadirnya RUU Perlindungan PRT karena kita membutuhkan UU yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja melalui implementasi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan kemanusiaan yang terkandung di dalam RUU PPRT ini.

“Kedua, Fraksi PKS mengharapkan perlindungan terhadap PRT yang diatur didalam RUU ini dapat memberikan perlindungan terhadap setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hukum,” ungkapnya

Fraksi PKS, katanya, mengharapkan RUU ini juga mengatur hak PRT untuk bekerja serta mendapatkan



imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan Kerja, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

“PRT berhak untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari penysiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Amin.

Ketiga, imbuhnya, Fraksi PKS memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa usulan lain yang dianggap relevan di dalam draft akhir RUU PPRT ini. Misalnya muatan

Perjanjian Kerja yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (1) paling sedikit memuat satu poin tambahan yaitu mengenai Jam Kerja.

“Pencantuman Jam Kerja di dalam Perjanjian Kerja dianggap perlu untuk memenuhi hak-hak si PRT sebagaimana diatur didalam Pasal 11 RUU ini. Pasal 11 tersebut memberikan hak kepada PRT untuk bekerja pada jam Kerja yang manusiawi,” pungkasnya.

Tetapi, lanjutnya, Jam Kerja tersebut tidak diatur secara jelas di dalam RUU dan tidak pula diwajibkan untuk dimuatkan didalam Perjanjian Kerja.

“Kami meminta diwujudkan jam kerja yang fair bagi PRT dengan memasukkan jam kerja didalam Perjanjian Kerja,” pungkas Amin.

# Fraksi PKS Kembali Interupsi di Baleg, Agar RUU HIP Didrop dari Prolegnas

“Ada dua alasan utama kenapa harus men-drop RUU HIP, agar kinerja Baleg dan bahkan kinerja semua Legislasi Nasional bisa tetap baik, krn kondisi yang tidak memungkinkan sehingga kita tidak mampu menyelesaikan seluruh Undang-Undang yang dicanangkan, karena adanya kondisi Covid-19”

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Baleg DPR RI

Jakarta (02/07) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menyampaikan interupsi dalam Rapat Kerja Baleg dengan DPD RI dan Menteri Hukum dan HAM RI dalam membahas Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, di Gedung DPR, Senayan, Kamis, (02/07).

Pada kesempatan tersebut Dr Mulyanto, anggota Baleg dari FPKS, kembali ulang interupsinya pd rapat internal Baleg sebelumnya, dengan tegas Mulyanto meminta pimpinan Baleg dan Pemerintah&DPD untuk membatalkan atau tidak

melanjutkan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan mendropnya dari Prolegnas. Menurut Mulyanto ada dua alasan utama RUU HIP harus di-drop dari Prolegnas

“Ada dua alasan utama kenapa harus men-drop RUU HIP, agar kinerja Baleg dan bahkan kinerja semua Legislasi Nasional bisa tetap baik, krn kondisi yang tidak memungkinkan sehingga kita tidak mampu menyelesaikan seluruh Undang-Undang yang dicanangkan, karena adanya kondisi Covid-19”, ungkapnya.

Yang Kedua, lanjut Mulyanto, karena konten RUU

yang juga ditolak oleh Masyarakat luas, aspirasi masyarakat luas itu menolak atas RUU HIP yang diusulkan, sehingga keduanya menjadikan wajar untuk mempertimbangkan RUU HIP ini agar didrop dari Prolegnas Prioritas.

“Di kesempatan yang baik ini, karena hadir Tripartit yakni Pemerintah, DPR dan DPD maka sangat tepat jika saya sampaikan kembali usul PKS, agar kita meng-evaluasi Prolegnas 2020. Maka kami Fraksi PKS kembali mengusulkan agar RUU HIP didrop dari Prolegnas. Karena tuntutan masyarakat sudah sangat luas sekali. Ini harus kita putuskan”, tegas Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Dalam kesempatan tersebut Mulyanto juga meminta dukungan dari Fraksi lain agar dengan tegas men-drop RUU HIP, karena sebelumnya Pemerintah pun sudah menyatakan menundanya.



Di Rapat Baleg DPR

# PKS Minta RUU HIP Ditarik dari Prolegnas



Ditariknya RUU HIP dari Prolegnas bisa menjadi jalan tengah. Sehingga betul-betul dengan mengamati dinamika perkembangan politik Tanah Air ini, kita mengambil satu jalan proaktif yang lebih menyejukkan. Kita Tarik, dan nanti ketika raker kita bicarakan dengan pihak pemerintah bahwa, udah, surpresnya nggak usah dibuat

**Dr. H. Mulyanto, M.Eng.**

Anggota DPR RI



# Tegas Minta RUU HIP dibatalkan, Fraksi PKS Terima Aspirasi Forum Masyarakat Betawi

Jakarta (19/06) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Anggota sekaligus Bendahara Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menerima Paguyuban Masyarakat Betawi pada Jum'at (19/6).  
Kedatangan mereka untuk menyampaikan dukungan kepada Fraksi PKS DPR yang sejak awal tegas menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).





## Fraksi PKS Menerima Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI)

Fraksi PKS DPR RI menerima Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI) di Gedung DPR RI pada Rabu (24/6).

Dari PKS hadir Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, Mardani Ali Sera, Bukhori Yusuf, dan Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Dalam kesempatan tersebut, sejak awal menegaskan sikap fraksi PKS menolak RUU HIP.

Adapun perwakilan massa hadir Ustadz Slamet Maarif, Yusuf Martak, Habib Muhsin, Sobri Lubis, Achmad Michdan dan sejumlah tokoh lainnya dipersilakan masuk. Mereka akan menemui pimpinan DPR RI.



## Terima Aspirasi Umat Kawal Penolakan RUU HIP

Fraksi PKS menerima Audiensi dari Forum Umat Bersatu Kota Depok dan Anggota DPRD Kota Depok.



Dalam kesempatan tersebut delegasi diterima oleh Ketua Fraksi DPR RI Dr. Jazuli Juwaini MA, Bendahara Fraksi PKS DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi dan Anggota DPR RI Komisi VI Mahfudz Abdurrahman.

Delegasi meminta Fraksi PKS DPR RI agar menolak RUU HIP karena bertentangan dengan Nilai-nilai Agama, Pancasila dan berpotensi menghidupkan ajaran Komunis/Marxis dan Leninisme.



Dr. H. Mardani, M.Eng

## Usulkan Lembaga Khusus untuk Kemerdekaan Palestina

Jakarta (03/07) --- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera pada pertemuan Pimpinan BKSAP dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, Jumat (03/07/2020) mengusulkan perlunya Indonesia membuat lembaga khusus untuk mendorong kemerdekaan Palestina





# Mardani Usulkan Lembaga Khusus untuk Kemerdekaan Palestina

“Bu Menteri, BKSAP DPR mendukung penuh kebijakan Kemenlu RI melawan kebijakan ‘Deal of Century’ yang akan dijalankan Israel menganeksasi tepi barat palestina dan lembah Jordan sebagaimana menjaga amanah konsitusi kita menolak penjajahan dalam bentuk apapun

## Dr. H. MARDANI, M.Eng

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Jakarta (03/07) — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera pada pertemuan Pimpinan BKSAP dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, Jumat (03/07/2020) mengusulkan perlunya Indonesia membuat lembaga khusus untuk mendorong kemerdekaan Palestina.

“Bu Menteri, BKSAP DPR mendukung penuh kebijakan Kemenlu RI melawan kebijakan ‘Deal of Century’ yang akan dijalankan Israel menganeksasi tepi barat palestina dan lembah Jordan sebagaimana menjaga amanah konsitusi kita menolak penjajahan dalam bentuk apapun,” kata Mardani, di Gedung

Pancasila, Kementerian Luar RI. Legislator Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi Pemerintah dan Dunia yang bisa membuat Israel menunda pencaplokan pada 1 Juli.

“Momentum ini bisa kita dorong untuk rekonsiliasi Israel-Palestina ke meja perundingan untuk menemukan solusi permanen,” ujar Mardani.

Dalam kesempatan itu Mardani mengusulkan pembuatan lembaga khusus untuk mendorong kemerdekaan Palestina.

“Indonesia harus terdapan mendorong kemerdekaan Palestina, Saya usulkan perlunya lembaga khusus untuk mendorong perjuangan kemerdekaan Palestina,” usul Mardani.

Lembaga itu, lanjut Mardani, digambarkan berada di bawah struktur Kemenlu RI yang bertugas menjalankan fungsi diplomasi khusus untuk mewujudkan Palestina Merdeka.

“Perlu ada lembaga khusus yang berperan menggalang dukungan komunitas Internasional mewujudkan Kemerdekaan Palestina, dananya kalau perlu bisa kita galang dari masyarakat untuk institusi ini,” ujar Mardani.

Mardani mengatakan pertemuan ini sebagai dukungan BKSAP DPR kepada Pemerintah untuk bisa terus bersuara keras di komunitas Internasional menolak penjajahan dalam bentuk apapun termasuk dengan tekan AS kepada Indonesia.

“Sampai Israel berhenti, kami akan terus mendorong Pemerintah untuk keras melawan bentuk penjajahan dalam bentuk apapun sampai Palestina medeka, tidak di blokade lagi, Jerusalem tidak di klaim sepihak milik Israel dan mendukung agar masyarakat Palestina bisa hidup dengan lebih layak sebagai warga negara dunia,” pungkasnya.





# Surahman Hidayat: Indonesia Harus Tolak Kejahatan Israel terhadap Palestina

Indonesia pada saat ini adalah negara tidak tetap Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan posisi strategis Indonesia pada saat ini, tentu peluang tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan perjuangan Palestina

## Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota BKSAP DPR RI

Jakarta (01/07) — Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat, mengemukakan keras rencana Israel menganeksasi wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan pada Rabu, (01/07).

"Hal ini tidak boleh didiamkan oleh komunitas internasional, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan," tegas Surahman.

Kenyataan bahwa Israel berencana melakukan aneksasi di tengah wabah COVID-19 menambah alasan dunia untuk menentang rencana tersebut. Tindakan Israel tersebut, menurut Surahman, sangat

tidak berperikemanusiaan dan perikeadilan.

"Terlihat sekali bahwa Israel berupaya memanfaatkan keadaan pandemi saat perhatian dunia sedang tertuju pada wabah penyakit, sehingga tidak banyak pertentangan dari komunitas internasional," kata Surahman.

Lebih lanjut, anggota Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan Jawa Barat X ini juga menyerukan agar Indonesia menggagas kekuatan bersama negara-negara sahabat untuk menggagalkan rencana tersebut.

"Pembelaan terhadap Palestina merupakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, Indonesia selayaknya membayar hutang budi politik andil Palestina dalam perjuangan dan pengakuan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945," ujar Surahman.

Surahman Hidayat mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang telah mengajak negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menolak proposal Israel tersebut, namun menurutnya harus lebih ditingkatkan lagi dengan merangkul negara-negara lainnya untuk menggagalkan rencana Israel.

"Indonesia pada saat ini adalah negara tidak tetap Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan posisi strategis Indonesia pada saat ini, tentu peluang tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan perjuangan Palestina," pungkas Surahman.



# Aleg PKS Kecam Rencana Illegal Israel Mencaplok Tanah Palestina

Dukungan dari perwakilan masyarakat internasional merupakan bentuk dukungan politik untuk terwujudnya eksistensi Negara Palestina. Aneksasi yang dilakukan Israel atas tanah Palestina merupakan rencana ilegal, maka dari itu harus dihentikan dan memiliki dampak yang menghancurkan hak asasi manusia warga Palestina”

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota BKSAP DPR RI

Jakarta (03/07) — Tindakan Israel yang ingin melakukan aneksasi terhadap wilayah Tepi Barat Palestina dinilai telah melanggar hak azasi manusia dan pendirian negara Palestina yang berdaulat penuh nantinya.

Karenanya, Badan Kerja Sama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menggalang dukungan Anggota Parlemen dunia untuk menentang rencana Israel tersebut.

Anggota BKSAP dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengatakan, dukungan dari perwakilan masyarakat internasional merupakan bentuk dukungan politik untuk terwujudnya

eksistensi Negara Palestina.

“Aneksasi yang dilakukan Israel atas tanah Palestina merupakan rencana ilegal, maka dari itu harus dihentikan dan memiliki dampak yang menghancurkan hak asasi manusia warga Palestina” ungkapnya.

Maka dari itu, Iskan mengapresiasi langkah Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang menggalang dukungan organisasi dan anggota parlemen-parlemen mitra BKSAP DPR RI untuk menolak dan menggagalkan proyek ilegal tersebut.

“Tindakan Israel itu jelas bertentangan dengan aturan-

aturan hukum internasional, resolusi-resolusi PBB terkait, dan menjauhkan realisasi program perdamaian di Timur Tengah,” tutur Iskan.

Iskan menambahkan rencana pencaplokan Israel akan merusak upaya perdamaian permanen di kawasan Tepi Barat.

“Karena sudah barang tentu, wilayah palestina nantinya yang akan dicaplok oleh Israel, Maka pemukim Palestina di kawasan tersebut akan kesulitan dalam mengakses layanan pokok seperti pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.

Warga palestina, katanya, yang berada di Tepi Barat sudah banyak merasakan perihnya hidup, banyak anggota keluarganya yang sudah menjadi korban atas perlakuan militer Israel.

“Jadi agenda aneksasi Israel ini, sudah selayaknya tidak pantas. Bahkan PBB dan masyarakat pelbagai negara yang diwakili parlemennya pun sudah menolak aksi ilegal ini. Hal ini makin menegaskan posisi Israel sebagai negara penjajah di abad modern ini,” tutup Iskan.



# Toriq Hidayat Bangun Optimisme Peserta Webinar Kemkominfo RI di Tasikmalaya

Diharapkan di fase kenormalan baru nanti jumlah kasus positif dan korban meninggal akibat Covid-19 dapat ditekan sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi, politik, sosial-budaya, bahkan kondisi pertahanan dan keamanan. Saya optimis, Bangsa Indonesia mampu melewati fase-fase berat kehidupan saat pandemi Covid-19 ini. Dan menjadi orang-orang yang menang

## **KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (27/06) — Pandemi Covid-19 di Indonesia memasuki babak baru. Yakni fase kenormalan baru atau masa new normal. 'Fase Kenormalan Baru' menjadi topik pembahasan pada webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pada, Kamis (24/06/2020)

Kegiatan ini dilakukan secara online yang lazim dilakukan di masa pandemi Covid-19. Kegiatan yang di ikuti oleh 130 orang peserta,

menghadirkan tiga orang narasumber yang kompeten untuk membahas topik 'Tampill Menjadi Pemenang di masa New Normal'.

Ketiga narasumber dalam webinar ini adalah Toriq Hidayat, selaku Anggota Komisi I DPR-RI asal Fraksi PKS, Widodo Muktiyo selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI dan Agus Sugianto selaku CEO Greenwatch Tasikmalaya.

"Fase kenormalan baru alias new normal adalah menjalani kehidupan dengan tetap menjalankan protokol

kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. New normal bukan berarti normal seperti sebelum adanya pandemi. Karena saat ini pandemi belum selesai," jelas Toriq.

Sebelumnya, sebagian besar kota dan kabupaten di Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, atau yang kita kenal dengan PSBB untuk memutus mata rantai pandemi.

Membatasi ruang gerak masyarakat, meliburkan perkantoran dan tempat pendidikan. Menonaktifkan sementara rumah ibadah, dan menghimbau masyarakat beribadah di rumah masing-masing. Namun belum selesai masalah kesehatan yang diakibatkan pandemi ini, timbul masalah besar lainnya.

"Belum selesai masalah di bidang kesehatan yakni puluhan ribu pasien positif Covid-19 yang harus ditangani dan ribuan meninggal dunia. kemudian timbul masalah lain. Yakni turunnya pertumbuhan ekonomi negara baik di sisi supply maupun demand, meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja dan jumlah pengangguran yang



mengakibatkan bertambah jumlah rakyat miskin. Oleh karenanya untuk mengatasi masalah ini semua maka Pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia memasuki fase kenormalan baru", ujar Toriq.

Fase dimana masyarakat Indonesia tetap bisa menjalani semua bidang kehidupan namun dengan tetap melakukan pencegahan penularan Covid-19.

"Diharapkan di fase kenormalan baru nanti jumlah

kasus positif dan korban meninggal akibat Covid-19 dapat ditekan sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi, politik, sosial-budaya, bahkan kondisi pertahanan dan keamanan", demikian Toriq menambahkan.

"Saya optimis, Bangsa Indonesia mampu melewati fase-fase berat kehidupan saat pandemi Covid-19 ini. Dan menjadi orang-orang yang menang" imbuhnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Lakukan Kunjungan Dapil,

# Ledia Hanifa Borong Sayur di Pasar Kota Bandung

Beberapa komoditi sayuran harganya sedang jatuh, padahal yang beli juga tidak banyak sehingga para pedagang mengeluhkan pendapatan mereka sangat jauh berkurang. Maka sayur-sayuran itu kami borong untuk kemudian dibagikan kpd warga.

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

Bandung (28/06) — Mengisi jadual kunjungan ke daerah pemilihan (kundangil) pada akhir pekan lalu, Ledia Hanifa Amaliah, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS melakukan sidak ke dua pasar di Kota Bandung.

Tak hanya memantau kondisi aktivitas pasar di era new normal, Ledia juga memborong berkarung-karung sayuran.

"Beberapa komoditi sayuran harganya sedang jatuh, padahal yang beli juga tidak banyak sehingga para pedagang mengeluhkan

pendapatan mereka sangat jauh berkurang. Maka sayur-sayuran itu kami borong untuk kemudian dibagikan kepada warga," jelas Ledia.

Pasar pertama yang didatangi Ledia adalah Pasar Cibogo di Kecamatan Sukajadi. Aleg Komisi X DPR RI ini memantau bagaimana situasi aktivitas perdagangan yang sudah mendapatkan ketuntuan dari pmda untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menjalani masa Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19 (New

Normal).

Dalam beberapa dialog singkat dengan para pedagang Ledia mendapati kalau mereka secara umum sudah memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan tersebut demi kebaikan bersama.

"Mayoritas pedagang sudah memahami dan menjalankan protokol kesehatan standar seperti memakai masker. Beberapa juga menambah dengan memakai face shield dan menyediakan hand sanitizer," ungkapnya.

Di beberapa tempat, lanjut Ledia, juga nampak disediakan sarana cuci tangan. Hanya faktor pembiasaan yang harus terus diingatkan oleh para pengelola pasar dan para pedagang sendiri, karena ancaman Covid-19 ini belum benar-benar sirna.

"Kalau ada yang lalai kan bisa menularkan pada yang lain, menyusahkan semua. Karenanya harus menjadi gerakan bersama untuk saling mengingatkan," kata Ledia lagi.

Selain dengan para pedagang, Ledia juga mengadakan dialog dengan Ketua RW setempat yang sekaligus sebagai pembina KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Tikujang (Ti urang, Ku urang, Jang kabehan) dan menerima berbagai curhatan dan masukan terkait penerapan kebiasaan baru di lingkungan Pasar Cibogo.



# Rendang Khas Sumbang semakin Go Internasional, Nevi Merasa Bersyukur

Kita perlu terus mengenalkan kekhasan kekayaan budaya negeri kita, karena meskipun terkenal di dalam negeri, pada kenyataannya masyarakat dunia belum terlalu mengenal secara prosentasenya

**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (29/06) — Istri Gubernur Sumatera Barat yang kini juga sebagai Anggota DPR RI Komisi VI, Nevi Zuairina, merasa bersyukur bahwa masakan khas asli Minangkabau kini semakin terkenal sampai Mancanegara.

Menurut Nevi, lezatnya rendang yang merupakan masakan khas Sumatera Barat ini telah dijadikan seorang koki terkenal asal Inggris untuk langsung mencoba memasak sendiri. "Bukan berhenti sampai disitu, bahkan koki internasional itu juga mengunjungi langsung dari pemasak aslinya di Sumatera Barat," imbuhnya. Pengenalan masakan

rendang asli Minangkabau ini, tambah Nevi, sajianannya berupa makan bajamba rendang Tanah Datar yang berlokasi di Istano Basa Pagaruyung. Kekhasan dari proses masak dan cara penyajiannya menjadi bahasan tersendiri yang semakin membuat penasaran warga mancanegara.

"Alhamdulillah, masakan khas Sumatera Barat yang dikenal dengan rendang kini telah semakin go International. Pada 29 Juni 2020 hari ini, pukul 09.00 WIB dan 21.00 WIB akan ditayangkan pada program acara Gordon Ramsey : Uncharted National Geographic", terang Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak karena berperan aktif mengenalkan masakan khas minang kepada dunia. Rendang yang sudah sangat terkenal di Indonesia, kini masyarakat dunia akan semakin mengenalnya.

Sebagai ketua TP PKK sumbar, Nevi menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya yang sangat baik ini dengan menjaga kualitas citarasa yang sesuai aslinya.

"Dengan begini, selain lezatnya kuliner asal minang yang beragam semakin dikenal, juga keindahan alam pemandangannya akan semakin membuat penasaran para penduduk dunia", urainya.

Bahkan, lanjut Nevi, ada Media International yang hingga tiga kali merilis i rendang adalah makanan terlezat di dunia mengalahkan kuliner lainnya di manca negara.

"Saya berharap, dengan semakin dikenalnya masakan



rendang, akan menjadikan Sumatera Barat pada khususnya, dan Indonesia secara keseluruhan, dijadikan referensi masyarakat dunia untuk datang dan mencicipi kuliner asli Indonesia. Kita perlu terus mengenalkan kekhasan

kekayaan budaya negeri kita, karena meskipun terkenal di dalam negeri, pada kenyataannya masyarakat dunia belum terlalu mengenal secara prosentasenya", tutup Nevi Zuairina yang juga Politisi PKS ini.





Rendang Khas Sumbar  
semakin Go Internasional,  
Nevi Zuairina merasa  
bersyukur



Saya berharap, dengan semakin dikenalnya masakan rendang, akan menjadikan Sumatera Barat pada khususnya, dan Indonesia secara keseluruhan, dijadikan referensi masyarakat dunia untuk datang dan mencicipi kuliner asli Indonesia



**Hj. Nevi Zuairina**  
Anggota DPR RI Dapil  
Sumatera Barat II

## Kunjungan Dapil ke Sejumlah UMKM

# Anis Byarwati Canangkan Program Kemitraan

"Upaya penambahan alat produksi, peningkatan mutu produk, peningkatan kapasitas produksi, perluasan pemasaran dan penyerapan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi UMKM menjadi terobasan yang akan ditindaklanjuti kemudian"

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (05/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, melakukan kunjungan Dapil (kundapil) ke beberapa UMKM di wilayah Kecamatan Pulogadung dan Jatinegara, Sabtu, (04/07/2020).

Unit usaha yang dikunjungi Anis, adalah Usaha Kue Kering (Shofi Grup) dan Usaha Frozen Food di kecamatan Pulogadung, serta Usaha Hala Mart di kecamatan Jatinegara.

Mulai dari awal merintis usaha, perjalanan berkembangnya usaha, kualitas dan variasi produk, sarana dan prasarana produksi, pemasaran sampai rencana pengembangan usaha, menjadi topik pembicaraan hangat Anggota Komisi XI DPR RI ini bersama para pengusaha UMKM yang dikunjungi.

Meski masih tak dapat

disembunyikan gurat lelah karena harus marathon dari sidang ke sidang. Mbak Anis biasa politisi PKS ini akrab disapa, tampak bersemangat dan antusias serap aspirasi kepada Pengelola UMKM.

Lebih jauh, dialog bersama para pengelola UMKM yang dikunjungi Anis mengemukakan apa saja kendala dan hambatan yang ditemui dalam melaksanakan usaha tersebut.

Anis menyampaikan beberapa solusi pada saat pengelola UMKM menyampaikan permasalahan, antara lain dengan Program Kemitraan yang beliau rancang.

"Upaya penambahan alat produksi, penguatan mutu produk, peningkatan kapasitas produksi, perluasan pemasaran dan penyerapan lapangan kerja

bagi masyarakat di sekitar lokasi UMKM menjadi terobasan yang akan ditindaklanjuti kemudian", ungkapnya.

Yusnaini, salah satu Pengusaha kecil yang dikunjungi mengatakan, baru kali ini ada Aleg yang mengunjungi dan mendengar perjalanan usaha kami ini.

"Saat ini kami memang mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha, karena membutuhkan beberapa alat produksi yang mahal harganya. Semoga program kemitraan yang Mba Anis canangkan menjadi solusi dan pintu sukses usaha kami ke depan," harap seorang pedagang.

Anis menambahkan, UMKM semacam ini harus didukung dan dibina dengan baik, apalagi pada saat kondisi ekonomi yang memburuk saat ini.

"Kelompok ini terbuka tangan terhadap guncangan krisis ekonomi. Selain itu, UMKM ini dapat menyerap lapangan kerja dari masyarakat sekitar. Beliau mengunjungi dengan detail sampai ke dapur produksi dan menyempatkan untuk membeli produk-produk UMKM yang dikunjunginya," tutup Anis.



# Aleg PKS Desak Kurang Bayar DBH Riau Jangan Sampai Tertunda Lagi

“Kejadian kurang bayar DBH ini sudah sering terjadi, maka kedepan kami minta Kemenkeu mencairkan DBH tepat waktu, terutama masa pandemi Covid 19 ini, sangat banyak keperluan daerah untuk mengatasi dampak Pandemi Covid ini baik dari segi kesehatan dan ekonom. Kami minta ini mendapat perhatian khusus Kemenkeu dan akan saya evaluasi serta tanyakan terus

**Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.**

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (02/07) — Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Riau 1, Chairul Anwar, mendesak pemerintah pusat untuk tidak lagi menunda pencairan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) terutama di daerah Provinsi Riau.

Hal itu disampaikan Chairul Anwar pada saat menghadiri Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

RAPBN 2021 di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (02/07).

Menurut Chairul kurang bayar dana bagi hasil akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah, terutama pada masa pandemi Covid 19 saat ini dimana perlu kebijakan anggaran yang lebih besar untuk membantu masyarakat terdampak Covid 19.

“Kami mendesak kepada

Kementerian Keuangan agar tidak lagi terjadi penundaan atau kurang bayar Dana Bagi Hasil terutama di dapil kami di Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan daerah penghasil minyak bumi yang terbesar di Indonesia sejak zaman orde baru, maka perlu perhatian khusus agar masyarakat Riau merasakan manfaat dari kekayaan minyak bumi di Provinsi Riau,” ungkap Chairul.

Politisi PKS asal Riau ini mengungkapkan bahwa kurang bayar DBH Riau ini sudah sering terjadi dari tahun ke tahun maka kami mendesak kepada Kementerian Keuangan agar kedepannya membayar dana bagi hasil tepat waktu.

“Kejadian kurang bayar DBH ini sudah sering terjadi, maka kedepan kami minta Kemenkeu mencairkan DBH tepat waktu, terutama masa pandemi Covid 19 ini, sangat banyak keperluan daerah untuk mengatasi dampak Pandemi Covid ini baik dari segi kesehatan dan ekonom. Kami minta ini mendapat perhatian



husus Kemenkeu dan akan saya evaluasi serta tanyakan terus”, tegas Chairul.

Selain kekurangan Dana Bagi Hasil yang di permasalahkan Anggota Komisi VI ini mempertanyakan juga dampak dari Pajak Sawit terhadap infrastruktur di Provinsi Riau.

“Kami di Provinsi Riau ini luas perkebunan sawit kami seperempat lebih dari luas Provinsi Riau yaitu sekitar 2,4 juta hektar. Artinya Pajak yang didapat dari Industri sawit juga sangat besar, maka kami meminta agar hasil pajak sawit juga bisa dirasakan oleh masyarakat Riau. Minimal jalan-jalan yang dilewati oleh truk pengangkut sawit yang menyebabkan jalan rusak bisa diperhatikan kondisinya. Kami meminta agar anggaran infrastruktur

tur jalan di Riau bisa ditingkatkan”, jelas Politisi kelahiran Pekanbaru ini.

Chairul juga menghimbau agar pemerintah daerah memanfaatkan Dana Bagi Hasil dan dana dari APBN yang didapatkan oleh Riau agar dimanfaatkan dengan baik untuk peruntukan kesejahteraan masyarakat Riau.

“Kami juga menghimbau kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Provinsi di Riau agar mengelola dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dengan baik dan benar. Baik dalam artian tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Riau dan benar dari segi pengelolaan administrasi, proses dan pelaporan anggaran yang telah digunakan,” tutup Chairul.

# Legislator PKS Minta Pemerintah Segera Buat UPT Kerbau di Sumbawa

Pemerintah harus memprioritaskan pemeliharaan kerbau Sumbawa yang merupakan salah satu rumpun kerbau lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Pulau Sumbawa dan telah dibudidayakan secara turun temurun. Kerbau Sumbawa merupakan kekayaan ternak asli Indonesia yang perlu dikembangkan dan dilestarikan

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (02/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, meminta Pemerintah untuk lebih serius mewujudkan peternakan kerbau yang unggul dan sehat di Pulau Sumbawa melalui dukungan lingkungan yang kondusif.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Johan meminta pemerintah segera membuat UPT Kerbau di Sumbawa untuk pemeliharaan bibit kerbau unggul

serta melakukan pemuliaan, produksi bibit kerbau unggul serta pemasaran nya.

Hal tersebut diungkapkan Johan, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian pada Hari Rabu (01/07/2020) di Gedung DPR RI.

Johan menjelaskan Pemerintah harus memprioritaskan pemeliharaan kerbau Sumbawa

yang merupakan salah satu rumpun kerbau lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Pulau Sumbawa dan telah dibudidayakan secara turun temurun.

"Kerbau Sumbawa merupakan kekayaan ternak asli Indonesia yang perlu dikembangkan dan dilestarikan," urai Johan.

Politikus PKS ini menyebutkan bahwa saat ini Nilai Tukar Petani Peternakan (NTP) selalu menurun dan memiliki tren negatif.

Johan mencontohkan NTP Peternakan pada Februari 2020 tercatat 98,23 kemudian turun menjadi 98,12 pada Maret 2020 kemudian saat ini turun drastis menjadi hanya 96,40.

"Dari sini kita bisa melihat bahwa peternak semakin mengalami kerugian dan pemerintah harus hadir membantu peternak rakyat untuk lebih sejahtera," kata Johan.

Legislator dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah melakukan pengembangan khusus untuk



kerbau Sumbawa.

"Dengan meningkatkan target akseptor lebih dari 10.000 kerbau dan menjadikan Pulau Sumbawa sebagai kawasan prioritas utama untuk pengembangan kerbau," tutur Johan.

Wakil rakyat dari Dapil NTB 1 ini menegaskan agar pemerintah menghentikan kebijakan impor kerbau dan fokus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.

"Dengan cara meningkatkan NPT mencapai 107,72 dan pengembangan populasi kerbau

mencapai 1,19 juta ekor pada tahun 2020 ini", papar Johan.

Johan berharap dengan segera dibentuknya UPT Kerbau di Sumbawa akan memudahkan pencapaian target akseptor kerbau mencapai lebih dari 10.000 ekor.

"Target kelahiran kerbau di Sumbawa sebanyak 270.450 ekor dan juga melakukan pengembangan kerbau Sumbawa untuk memenuhi kebutuhan daging nasional pada tahun 2020 ini," tutup Johan.

# Aksi Penolakan di Sukabumi Kembali Berlanjut, Meminta RUU HIP Dihapus dari Prolegnas

“Bagi PKS, Pancasila sudah final bahwa masyarakat Sukabumi tidak takut apapun resiko yang diambil. Perjuangan menolak RUU HIP ini belum selesai karena dari hasil di rapat internal fraksi menginformasikan bahwa di 2020 ada 10 RUU yang dihapus dari prolegnas tidak termasuk didalamnya RUU HIP

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (05/07) — Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat dan Aktivis Sukabumi Raya, menggelar Apel Siaga Ganyang Komunis di Lapang Merdeka Sukabumi, Minggu (05/07).

Apel yang mengusung narasi penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tersebut, tidak hanya dilakukan di Sukabumi, melainkan digelar serentak secara nasional.

Apel tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet serta beberapa Anggota DPRD Kota Sukabumi.

Dalam kesempatan yang sama, Slamet mengatakan, RUU HIP tidak masuk ke dalam 10 RUU yang dihapus dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020 ini.

“Kita masih perlu perjuangan ekstra-parlementer. Sebab, bila hari ini yang menolak hanya Fraksi PKS dan Demokrat, maka tidak lebih dari 150-an kursi. Sehingga, jangan tertipu ketika

pemerintah dan DPR RI mengatakan akan ditunda. Karena sekali lagi, di 2020 tidak ada pencabutan terhadap RUU HIP di Prolegnas,” jelas Slamet.

Menurut Slamet, Kegiatan ini memberikan pesan kepada pemerintah pusat bahwa meskipun hari ini pandemi Covid-19 resikonya kematian, tapi untuk Indonesia yang jaya tidak takut dengan resiko itu kami rela mati untuk Indonesia.

“Bagi PKS, Pancasila sudah final bahwa masyarakat Sukabumi tidak takut apapun resiko yang diambil. Perjuangan menolak RUU HIP ini belum selesai karena dari hasil di rapat internal fraksi menginformasikan bahwa di 2020 ada 10 RUU yang dihapus dari prolegnas tidak termasuk didalamnya RUU HIP,” tegasnya.

Slamet menjelaskan, upaya melakukan konsolidasi di parlemen harus diperjuangkan dalam menolak RUU HIP.

“Artinya kemungkinan RUU HIP dibahas itu ada dan harus diawal oleh masyarakat,” pungkasnya





# Teddy: Ruh Pancasila Ada Dalam Diri Pemuda

jika para pemuda sudah memiliki rasa kesetiakawanan sosial maka sejatinya para pemuda tersebut telah menerapkan nilai-nilai Pancasila yang luhur. sikap kesetiakawanan sosial ini harus terus dipupuk, dipelihara dan dikembangkan. Perlu contoh dari para pemimpin bangsa ini

## TEDDY SETIADI, S.Sos.

Anggota DPR/MPR RI Dapil Jabar I

Bandung (05/07) — Dalam acara sosialisasi 4 Pilar di Rumah Makan Wong Solo Bandung, Teddy Setiadi menyampaikan bahwa pemuda memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Hal ini terbukti dari aksi-aksi solidaritas yang ditunjukkan pemuda dalam berbagai hal.

Dalam hal positif kita merasakan banyak karya-karya pemuda dengan segudang inovasinya sebut saja ada buka-lapak, kitabisa, dan komunitas-komunitas pemuda lainnya yang menciptakan banyak kontribusi positif dengan semangat kesetiakawanan sosial.

Kesetiakawanan Sosial adalah pengejawantahan dari

nilai-nilai Pancasila.

"Sebagai contoh, di era pandemi covid-19 ini, menerapkan physical distancing, memakai masker termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan adalah bentuk kesetiakawanan sosial." Jelas Teddy

"Memang anak muda memiliki sistem imun yang baik. Kebanyakan dari mereka disebut orang tanpa gejala. Namun jika kita mengedepankan rasa empati, rasa kepedulian kita tentunya kita tidak akan seandainya berkelakuan tanpa mengindahkan aturan yg berlaku." Tutup Teddy

Oleh karena itu, lanjutnya,

jika para pemuda sudah memiliki rasa kesetiakawanan sosial maka sejatinya para pemuda tersebut telah menerapkan nilai-nilai Pancasila yang luhur.

"Sikap kesetiakawanan sosial ini harus terus dipupuk, dipelihara dan dikembangkan. Perlu contoh dari para pemimpin bangsa ini," pungkasnya.

Dengan adanya sosialisasi empat pilar ini diharapkan para pemuda mengetahui jati dirinya dan jati diri bangsanya sehingga bisa bersikap positif dalam menghadapi pandemi ini dan juga bertanggung jawab.



## PROFIL

## H. ALIFUDDIN, S.E., M.M



## Keluarga HARUS KOMPAK & SALING PEDULI

**A**wal Juni ini kita akan berkenalan bersama salah satu Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Pulau nomor tiga terbesar di dunia Kalimantan atau Borneo yaitu H. Alifuddin, S.E., M.M. pria kelahiran Jakarta, 25 Agustus 1965.

Bang Alif menikah dengan Hj. Susanti, SE pada 17 Juli 1988 dan dikaruniai satu Putri dan enam putra, yakni Shifwati Shofah Alifuddin, Abdullah Hasan Alifuddin, Ahmad Husain,

Marwan Hadi, Muhammad Hilmi, Mujahid Haris, Sahal Dhiya Faturrahman, sebuah karunia Allah yang senantiasa Bang Alif syukuri. Bismillah Sakinah mawadah warrahmah. "Jadilah keluarga besar yang bahagia, kompak dan saling peduli"

H Alifudin, SE, MM merupakan nama yang tidak asing di tengah-tengah kader PKS Kalimantan Barat. "Bang Alif" sapaan akrabnya merupakan orang yang pertama

kali mengenalkan gerakan tarbiyah di kalangan pemuda Kota Pontianak, gerakan tarbiyah sendiri merupakan cikal bakal berdirinya Partai Keadilan (PK) yang saat ini berubah menjadi PKS.

Bang Alif merupakan alumni (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) STAN angkatan 1988 dan mendapatkan tugas sebagai pegawai BPKP di Pontianak. Pindahanya Bang Alif ke Pontianak, Kalimantan Barat, merupakan daerah yang tak pernah dibayangkan.

Terlibatnya Bang Alif dalam aktivitas dakwah, membuat jalan seperti dimudahkan, perkenalannya dengan salah seorang teman yang ternyata berasal dari Pontianak, membuat Bang Alif sedikit mengenal dan merasa dekat dengan Kota yang terkenal dengan Tugu Khatulistiwa.

Persinggahan pertama di Pontianak, Bang Alif langsung menuju "Keluarga Baru" nya, di Jalan Karimun No. 3. Di Rumah Ulama Besar Kalimantan Barat, H. Khatib Syarbaini.

Perubahan situasi politik era reformasi pada tahun 1998 membuat gerakan tarbiyah bertransformasi menjadi Partai Keadilan, dan resmi menjadi peserta pemilu pada tahun 1999.

Bang Alif memutuskan untuk berhenti menjadi PNS BPKP dikarenakan peraturan politik melarang PNS untuk

terlibat dalam parpol. Pada Tahun 1999 Bang Alif maju menjadi caleg dari PK untuk dapil Kota Pontianak, dan berhasil duduk sebagai kader PK pertama yang menjadi Anggota DPRD Kota Pontianak.

Bang Alif, yang menamatkan S1 dan Program Magisternya Manajemen (S2) di Universitas Tanjungpura Pontianak, sempat menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 2009 – 2014 untuk dapil kota Pontianak.

Bang Alif yang pernah diamanahkan menjadi Sekretaris DPW PKS Kalbar, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), dan pengalaman politik yang cukup panjang lainnya membuat Bang Alif saat ini di percaya sebagai Anggota Ma-

”

## Jadilah keluarga besar yang bahagia, kompak dan saling peduli

jelis Syuro dari Kalbar, dan juga diamanahkan sebagai Anggota Wilda Kalimantan DPP PKS.

Pesan Bang Alif untuk keluarga Indonesia "jadilah keluarga besar yang bahagia, kompak dan saling peduli"

### SOCIAL MEDIA

Untuk mengetahui sepak terjang, H. Alifuddin, S.E., M.M. dapat mengikuti social media:

Facebook : H Alifudin SE MM  
Instagram : @bangaliftpk  
Twitter : @bangaliftpk  
Yutub : Bang Alif  
Website : alifudin.com



*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

**KANAL RESMI  
FRAKSI PKS  
DPR RI**

**fraksi.pks.id**



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI